

**ANALISA**

Tahun V. NO. 2

PEBRUARI 1976

**ASEAN:  
PROSPEK DAN  
PERMASALAHANNYA  
(I)**





Tahun V, No. 2  
FEBRUARI 1976

ASEAN :  
PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA  
(I)

seri ANALISA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES  
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Phone 56532/35



## PENGANTAR PENERBIT

Salah satu peristiwa bersejarah dan menonjol dalam bulan Februari 1976 ini sehubungan dengan perkembangan percaturan politik internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara, adalah diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang pertama kalinya sejak didirikannya Organisasi Kerjasama Antar Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu pada tanggal 8 Agustus 1967 yang lalu.

Pertemuan puncak ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 24 Februari 1976 di Bali merupakan peristiwa yang sangat penting, karena pertemuan itu diadakan justru pada saat-saat di mana bangsa-bangsa di Asia Tenggara khususnya, dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan perubahan, baik yang terjadi langsung di kawasan ini atau di bagian dunia lain pada umumnya.

Salah satu permasalahan dimaksudkan di atas adalah perubahan dan perkembangan yang terjadi di kawasan Indocina di samping permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam tubuh kerjasama regional ASEAN sendiri, seperti masalah perdagangan bebas (Free Trade) ASEAN, masalah sengketa Sabah, masalah insurgensi, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itulah maka penerbit menganggap penting untuk menyampaikan beberapa pembahasan berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas dalam Edisi ANALISA tahun ke-V nomer 2 bulan Februari kali ini, dengan mengemukakan tulisan J. PANGLAYKIM berjudul "Kerjasama Ekonomi Perdagangan ASEAN: Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade", dan tulisan J. Soedjati DJIWANDONO berjudul "ASEAN Sesudah KTT". Kalau J. PANGLAYKIM di dalam tulisan itu menitik-beratkan pembahasannya berkenaan dengan masalah perekonomian dan perdagangan ASEAN, maka J. Soedjati DJIWANDONO mengemukakan pembahasannya ditinjau dari segi politik, keamanan dan pertahanan serta perkembangan yang terjadi di Indocina. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa didapatkan gambaran mengenai perkembangan ASEAN dalam keadaan yang relatif agak utuh sifatnya.



Keputusan memuatkan tulisan kedua penulis itu bukanlah didasarkan anggapan bahwa kedua penulis adalah ahli atau expert di bidang ASEAN, karena memang kedua penulis bukanlah expert di bidang ASEAN sebab kegiatan sehari-hari kedua penulis bukanlah melulu menangani dan mengamati permasalahan dan perkembangan ASEAN, tetapi lebih didasari oleh alasan karena kedua penulis adalah "ASEAN believers". Kedua penulis mempunyai keyakinan akan perlunya dan tepatnya bentuk kerjasama ASEAN di dalam pola strategi hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara, dan oleh karena keyakinannya itu memperhatikan dengan seksama dan melibatkan dirinya di dalam masalah "hidup-mati"nya ASEAN.

Melihat luasnya permasalahan dan pentingnya pembahasan mengenai ASEAN secara mendalam, maka penerbit memutuskan untuk menyampaikan pembahasan ASEAN dengan judul "ASEAN : PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA" dalam dua kali penerbitan, yaitu bagian I dalam Edisi ANALISA nomer 2 bulan Februari 1976 dan bagian II dalam Edisi nomer 3 bulan Maret 1976, dengan melampirkan pula beberapa dokumentasi ASEAN.

Sekalipun diterbitkannya pembahasan mengenai ASEAN dua kali berturut-turut dalam edisi ANALISA, tidaklah berarti bahwa pada masa-masa mendatang tidak akan ada lagi penerbitan mengenai ASEAN. Tetapi justru sebaliknya, karena penerbit menyadari bahwa perkembangan dan permasalahan yang terjadi dengan perjalanan organisasi kerjasama regional ASEAN berlangsung dengan sangat cepat, maka perkembangan ASEAN akan senantiasa perlu diamati dan disampaikan kepada masyarakat pada waktunya. Sehingga melalui pemuatan pembahasan ASEAN berkali-kali di dalam ANALISA ini diharapkan, bahwa kerjasama regional ASEAN akan dapat lebih dirasakan dan dihayati sepenuhnya sebagai milik bersama masyarakat bangsa-bangsa anggota ASEAN dan diharapkan permasalahannya juga dapat dirasakan sebagai permasalahan bersama atau dengan istilah populernya kerjasama regional ASEAN benar-benar dapat dimasyarakatkan. Semoga !

## DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	<i>iii</i>
 <i>KERJASAMA EKONOMI-PERDAGANGAN ASEAN BEBERAPA TANGGAPAN ATAS KONSEP ASEAN FREE TRADE AREA</i>	
<i>J. PANGLAYKIM</i>	<i>1</i>
 <i>ASEAN SESUDAH KTT</i>	
<i>J. Soedjati DJIWANDONO</i>	<i>31</i>





# KERJASAMA EKONOMI-PERDAGANGAN ASEAN

## BEBERAPA TANGGAPAN ATAS KONSEP ASEAN FREE TRADE AREA

J. PANGLAYKIM

### I. PENGANTAR

Pemberitaan tentang perkembangan dan kemajuan ASEAN di berbagai mass media lebih bersifat pemberitaan formil mengenai berbagai pertemuan para Menteri, pejabat senior, pernyataan bersama dan sebagainya, sedangkan informasi yang lebih substantif masih sangat kurang khususnya pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi/perdagangan. Akhir-akhir ini seringkali kita sering mendengar tentang Free Trade Area, package deal, industrial complementarity dan sebagainya. Mungkin karena semua konsep pembahasan dan kesimpulan mengenai masalah ekonomi/perdagangan masih bersifat sementara, maka bahan-bahan tersebut masih belum tersebar secara luas di luar kalangan pejabat.

Karangan singkat ini berusaha memberikan sekedar gambaran tentang beberapa pemikiran para pejabat/ekonom ASEAN mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penulis tidak berpretensi untuk mencakup semua pemikiran yang ada, tapi hanya terbatas pada berbagai pemikiran yang pernah dilontarkan dalam berbagai pertemuan, papers dan sebagainya. Sebagai sumber utama karangan ini adalah beberapa kertas kerja yang disampaikan pada seminar *The ASEAN: Problems and Prospects in a Changing World* yang diadakan di Chulalongkorn University, Bangkok, 18-20 Desember 1975.

## II. BEBERAPA PENGALAMAN

Wionzeck<sup>1</sup> dalam bukunya mengatakan bahwa tidak atau kurang berhasilnya LAFTA (Latin American Free Trade Area) bukan karena konsep kerjasama ekonomi regional adalah salah atau tidak dapat dilaksanakan, tetapi karena pemilihan strategi yang tidak tepat. Dalam pengalaman LAFTA strategi yang menghendaki liberalisasi perdagangan dijadikan faktor utama dalam integrasi regional ternyata tidak membawa perkembangan seperti yang diharapkan. Ia juga berpendapat bahwa teknik-teknik kerjasama dan usaha ke arah pengintegrasian, serta pendekatan-pendekatan yang baik dan mungkin dapat diterapkan di negara-negara Barat (EEC dan sebagainya) belum tentu tepat untuk diterapkan dalam suatu *under-development setting*. *Business Week* (January 12, 1976) menyebutkan bahwa pengawasan ketat atas bidang impor telah menggegerkan sektor bisnis. Dengan adanya pengawasan impor yang ketat, tarif akan merupakan salah satu senjata (mekanisme) yang akan dipergunakan.

Tetapi para pemrasaran dalam Seminar Bangkok agaknya lebih cenderung untuk berpendapat bahwa LAFTA diperkirakan telah berhasil sehingga harus merupakan cambuk bagi ASEAN untuk menjadikan Free Trade Area sebagai suatu katalisator. Tetapi melihat keadaan perekonomian Brazil dan Chili, kita dapat bertanya apakah benar liberalisasi perdagangan telah membawa kemajuan pada kerjasama ekonomi regional.

Selanjutnya Wionzeck juga mengatakan bahwa ketegangan (friksi) yang timbul karena kuatnya nasionalisme ekonomi dan ketidak-seimbangan kekuatan ekonomi jangan diabaikan. LAFTA menurut Wionzeck menjadi suatu *preferential trade zone* yang sangat lemah. Akan tetapi ia juga berpendapat bahwa kerjasama regional merupakan salah satu jalan yang efektif dalam meningkatkan perekonomian masing-masing negara anggota jika memilih strategi yang tepat.

---

<sup>1</sup> Miquel S. Wionzeck, Economic Cooperation in Latin America, Africa, Asia, MIT Press, 1969.



### III. LAPORAN TEAM PBB TENTANG ASEAN

Laporan Team PBB yang membahas secara terperinci kerjasama ekonomi di antara negara-negara ASEAN nampaknya masih merupakan dokumen dasar bagi studi mengenai kerjasama ekonomi ASEAN. Sayang laporan ini masih belum tersebar luas karena masih terbatas di kalangan resmi saja, yaitu para pejabat tinggi dan beberapa kalangan universitas yang mempunyai hubungan dengan para pejabat tersebut. Karena laporan ini merupakan salah satu sumber inspirasi bagi para pemikir di bidang kerjasama ekonomi ASEAN, ada baiknya jika diketahui oleh sebanyak mungkin peminat. Laporan ini yang secara keseluruhan lebih bersifat pendekatan ekonomis, mungkin dapat dilengkapi dengan suatu studi dengan pendekatan dari sudut bisnis yang pada dasarnya lebih praktis dan dapat menciptakan hal-hal yang lebih konkrit.

Secara singkat laporan PBB mengusulkan:

#### 1. Liberalisasi perdagangan secara selektif (Selective trade liberalization)

Usul team adalah mengadakan pendekatan step-by-step dan item-by-item sehingga teknik negosiasi pada suatu saat mencapai lingkungan yang lebih luas. Dalam jangka panjang diharapkan bahwa sekitar tahun 1990 (laporan ini dibuat 7-8 tahun yang lalu) ASEAN dapat menyetujui suatu ASEAN Free Trade Area. Di sini terlihat adanya suatu time schedule.

#### 2. Persetujuan komplementaris di bidang industri (Industrial Complementary Agreement)

Menurut laporan, teknik ini telah dilaksanakan secara berhasil di Amerika Latin, dengan diserahkan pada sektor swasta. Sektor swasta mengadakan negosiasi dan mempersiapkan suatu rencana kerja dalam mendirikan pabrik-pabrik/unit produksi *large scale* di berbagai negara ASEAN dengan ketentuan jika sesuatu negara ASEAN sudah mendapatkan persetujuan mendirikan sejenis pabrik/unit produksi, maka negara anggota lain tidak mendirikan lagi. Dengan demikian terdapat semacam spesialisasi dalam industri di negara-negara yang memiliki *factor endowment* yang cocok

dan kemudian diadakan pertukaran atau perdagangan hasil-hasilnya di antara negara-negara ASEAN. Contoh yang diambil misalnya pembuatan spare parts di berbagai negara ASEAN lalu dikumpulkan di suatu negara sehingga menjadi mobil, mesin dan sebagainya. Akan tetapi untuk pelaksanaannya antar pemerintah ASEAN harus sudah ada persetujuan tentang tarif, pertukaran, alokasi dan pembagian untung/produk yang seimbang.

### 3. Package deal

Ini merupakan perundingan antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara-negara ASEAN menuju pembentukan perusahaan large scale dalam bidang *intermediate products*, dan khususnya industri-industri yang belum ada di negara ASEAN. Misalnya kompleks petrokimia, baja dan sebagainya.

4. Team PBB juga mengusulkan kerjasama di bidang pengangkutan, pertanian, perhutanan, keuangan dan usaha-usaha di bidang jasa lainnya. Pada pokoknya laporan ini dianggap sebagai laporan yang mendekati masalah ASEAN secara sistimatis, seimbang dan menyeluruh.

## IV. BEBERAPA TABEL DAN CATATAN MENGENAI PERDAGANGAN INTRA-ASEAN

Kekurangan angka-angka dan data merupakan salah satu halangan bagi para analis. Mungkin beberapa angka dan data ini akan berguna yang kami kutipkan dari beberapa kertas kerja yang diajukan pada seminar ASEAN di Bangkok.

### 1. Per kapita, perkembangan penduduk dan sektor manufacturing dan indikator ekonomi di ASEAN

Tabel 1 dan Tabel 2 menggambarkan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah penduduk dan sektor manufacturing serta indikator-indikator ekonomi di negara-negara ASEAN. Dilihat dari sudut pendapatan per kapita kita lihat bahwa Singapura mempunyai pendapatan per kapita sebesar \$2,465,



Malaysia \$ 723, Pilipina \$ 323, Muangthai \$ 292 dan angka untuk Indonesia dari tahun 1973 yaitu \$ 123. Mungkin angka ini sudah mendekati \$ 150/170 pada tahun 1974/1975. Peningkatan jumlah penduduk paling rendah di Singapura, bahkan anak ketiga sudah dianggap sebagai *unwanted child* karena tidak diberi fasilitas dalam hal pendidikan dan sebagainya. Muangthai tampaknya yang tertinggi dengan 3.09%, kemudian Pilipina dengan 3.09%, Malaysia dengan 2.54% dan Indonesia 2.40%. Sumbangan sektor industri kepada GNP menggambarkan Singapura dengan 24.8%, Pilipina 17.4%, Muangthai 17.1%, Malaysia 14.8% dan Indonesia 8.6%.

## 2. Nilai jumlah perdagangan negara-negara ASEAN

Tabel 3 menggambarkan nilai jumlah perdagangan negara-negara ASEAN di mana volume perdagangan Indonesia memperlihatkan kemajuan yang pesat dibandingkan dengan tahun-tahun 1968/1969.

## 3. Perkembangan perdagangan intra-ASEAN

Tabel 4 menggambarkan perkembangan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Untuk beberapa negara perdagangan dan jasa-jasa merupakan dua sektor yang penting sekali bagi perekonomiannya, misalnya Singapura dan Malaysia. Menurut Lin See-yan perdagangan Singapura merupakan 2/3 dari produk domestik, Malaysia 50% sedangkan Pilipina dan Indonesia masing-masing kurang lebih 20%. Perdagangan antar negara ASEAN pada tahun 1970 masih 17.4% dan menurun sampai kurang lebih 12.8% pada tahun 1974. Perdagangan antara negara ASEAN pada umumnya terdiri dari bahan-bahan makanan (seperti sayur-mayur, cattle food dan sebagainya untuk Singapura, beras dari Muangthai dan sebagainya), bahan-bahan mentah dan entrepot trade. Hasil-hasil industri lain dapat dikatakan belum berarti.

Perincian perdagangan antar negara ASEAN tercantum dalam tabel-tabel berikutnya (Tabel 5 sampai dengan 9). Perdagangan antar negara ASEAN menurut pandangan kami akan menurun karena banyak di antaranya menerima investasi secara besar-besaran dari Jepang. Kekurangan modal, equity dan modal kerja telah menyebabkan Jepang datang ke negara-negara ASEAN dengan sistim

*package deal*, di mana joint venture itu diberi fasilitas dalam bentuk pembelian mesin-mesin, equipment, bahan-bahan mentah (intermediary raw materials), modal equity dan modal kerja. Dapat dibayangkan bahwa dengan sistim ini, pasar bahan mentah industri diarahkan ke Jepang dan jika joint venture berusaha di bidang perhutanan ekspor langsung diarahkan ke Jepang. Dengan pola yang mengarahkan perekonomian ASEAN ke Jepang, tidak mengherankan jika perdagangan antar negara ASEAN menurun dan sebagian didorong/dialihkan ke Jepang. Mungkin kita semua sudah menyadari hal ini, akan tetapi jika ASEAN secara bersama-sama atau masing-masing tidak menciptakan peralatan dan kapabilitas sendiri secara maksimum, trend ini akan berjalan terus. Ini terlihat sekali dalam Tabel 10 yang menggambarkan arah perdagangan ASEAN.

#### 4. Perdagangan internasional dan ASEAN

Tabel 11 dan 12 menggambarkan perdagangan dilihat dari sudut internasional atas persentase dan jutaan dollar. Antara Tabel 4 yang menggunakan denominasi SDR dan Tabel Sondysuwan yang menggunakan denominasi US\$ terdapat perbedaan dalam persentase, yaitu 13.42% dan 15.6% di tahun 1973. Di sini kita melihat bahwa saham yang terbesar dipegang oleh Jepang dengan 26.36%.

#### V. BEBERAPA PANDANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PERDAGANGAN

Beberapa pandangan yang diajukan di sini didasarkan atas beberapa kertas kerja yang mengemukakan pandangan pribadi para penulisnya. Akan tetapi melihat kedudukan dan fungsi mereka di negara masing-masing, secara tidak resmi ini merupakan refleksi pandangan pemerintah masing-masing.

Yang jelas para penulis hampir seluruhnya memperoleh pendidikannya di negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan mungkin beberapa berasal dari pusat pendidikan yang sama seperti Harvard, Berkeley, dan sebagainya.



## 1. Singapura

Dari sudut struktur tarif, Singapura termasuk di antara negara-negara ASEAN yang mempunyai tarif yang terendah. Dahulu Singapura adalah suatu free port dan terutama hidup dari entreport trade. Akhir-akhir ini mereka sudah mulai memasuki era industri. Sumbangan sektor manufacturing pada GNP-nya sudah meningkat sampai kurang lebih 25% di tahun 1973. Walaupun demikian dewasa ini, khususnya dalam krisis internasional, dirasakan sekali kesulitannya mencari pasaran industri di Singapura, karena bagaimanapun sektor perdagangan dan jasa-jasa masih merupakan sektor-sektor yang vital untuk perekonomian Singapura.

Singapura berpendapat bahwa dalam memperlancar perdagangan antar negara ASEAN untuk dapat menarik para investor, *ASEAN Trade Liberalisation Scheme (ATLS)* dan *ASEAN Preference System (APS)* merupakan satu jawaban yang dapat memberikan momentum dan arti pada kerjasama ekonomi ASEAN. ATLS dan APS yang diusulkan oleh Prof. Lim Chong Yah menghendaki:

- a. dihilangkannya secara menyeluruh (over the board) atau sebagian tarif dan halangan-halangan non-tarif di bidang perdagangan untuk barang-barang tertentu.
- b. diadakannya sistim preferensi pada impor dari negara-negara ASEAN dengan mengintroduksikan dua sistim yang rendah untuk negara-negara ASEAN dan lebih tinggi untuk negara-negara non-ASEAN. Dalam rangka ini Prof. Lim mengusulkan suatu *Moratorium* yang memberikan jangka waktu ke arah suatu *Free Trade Area* yang *full fledge* dan penurunan tarif secara menyeluruh. Dalam hubungan ini diperhitungkan bahwa karena adanya posisi yang tidak seimbang dalam perekonomian ASEAN, Prof. Lim mengusulkan suatu skema kompensasi yang harus ditinjau secara terus menerus sehingga dapat diterima oleh semua anggota ASEAN. Pandangan-pandangan Prof. Lim Chong Yah yang diajukan pada seminar di Bangkok agak paralel dengan yang pernah diajukan pada pertemuan antar Planning Ministers pada bulan Nopember 1975 di Jakarta.

## 2. Malaysia

ASEAN dilihat sebagai suatu bentuk kerjasama yang mempunyai potensi besar dan dapat menjadi akselerator bagi pertumbuhan ekonomi serta dapat mempertinggi taraf hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara. Tendensi ke arah impor bahan-bahan industri meningkat sekali dan ada titik kejenuhan pada sektor manufacturing. Dewasa ini masing-masing negara ASEAN membutuhkan antara lain barang-barang modal dan bahan-bahan industri (*intermediate goods*) sehingga sudah merupakan suatu keharusan negara-negara ASEAN memikirkan pembentukan industri-industri yang lebih kompleks dan *sophisticated*. Karena dewasa ini *intermediary inputs* umum dibuat di negara-negara industri, maka kita harus membuatnya di ASEAN. Untuk ini tidak saja dibutuhkan modal yang besar akan tetapi juga pembentukan industri-industri tersebut harus berdasarkan *economies of scale*. Penulis Lin See-yan dari Bank Sentral Malaysia berpendapat bahwa masih terdapat berbagai macam halangan. Halangan dan masalah-masalah yang masih harus dihadapi dan diselesaikan antara lain:

- a. tidak dan kurang majunya kerjasama ekonomi ASEAN secara pesat antara lain disebabkan oleh kurang adanya tujuan yang lebih spesifik dan tidak adanya target serta jangka waktu yang disetujui bersama untuk melaksanakan suatu konsep spesifik.
- b. belum adanya suatu *integrated policy* yang disebabkan oleh belum adanya *time table* yang disetujui.
- c. adanya halangan yang bersifat struktural dan institusionil yang tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing negara ASEAN dalam waktu yang cepat.
- d. konsep kerjasama regional merupakan konsep yang agak baru untuk ASEAN.

Usul-usul yang diajukan menunjukkan adanya suatu *sense of urgency* dan *sense of timing* yang mungkin memang hidup di antara intelektual di Malaysia. Selanjutnya diusulkan juga adanya:

- a. lalu lintas (*free movement*) bebas untuk bahan-bahan makanan di antara negara-negara ASEAN.



- b. kerjasama yang lebih erat mengenai suplai bahan makanan dan bahan mentah.
- c. pendekatan step-by-step dan item-by-item dalam liberalisasi perdagangan selektif, dengan menentukan suatu *target* waktu yaitu tahun 1990, sehingga semua halangan bersifat tarif dan non-tarif dapat dihapuskan.
- d. melaksanakan teknik-teknik komplementaris industri dan persetujuan package deal (seperti diajukan dan diusulkan oleh Team PBB).
- e. suatu pendekatan dan kebijaksanaan yang sama dalam menghadapi masalah komoditi.

### 3. Pilipina

- a. Pilipina berpendirian agar negara-negara anggota ASEAN secara berangsur-angsur menurunkan tarif dan menghilangkan barrier sehingga dalam jangka waktu yang ditentukan dapat menciptakan suatu ASEAN Free Trade Area. Dalam rangka menciptakan kondisi-kondisi ke arah AFTA, diusulkan agar negara-negara ASEAN tidak mempertinggi tarif-tarifnya dan juga tidak berusaha mengadakan restriksi-restriksi perdagangan yang baru. Pilipina juga mengusulkan agar untuk pertama kali negara-negara ASEAN secara menyeluruh menurunkan tarif, misalnya dengan 10% (Usul ini paralel dengan usul Singapura).
- b. di bidang industri juga ada pemikiran ke arah pembentukan industri-industri yang didasarkan atas prinsip large scale.
- c. dalam rangka pemberian prioritas, diusulkan agar negara-negara ASEAN mempunyai preferensi terhadap komoditi yang diproduksi di ASEAN dan juga mempunyai access pada pasaran produk-produk ini.
- d. dalam rangka masalah komoditi Pilipina berpendapat bahwa harus ada suatu kebijaksanaan dan pendekatan yang sama sehingga negara-negara produsen dapat mempertinggi hasil eksportnya.
- e. kerjasama yang erat diusulkan di bidang investasi luar negeri, perencanaan regional pada khususnya di bidang pertanian dan industri, mengadakan persetujuan komplementaritas, serta mengembangkan sistim

pengangkutan, komunikasi yang vital sekali untuk perkembangan perdagangan intra-ASEAN.

f. merumuskan kebijaksanaan di bidang keuangan, perburuhan, asuransi dan bidang-bidang jasa yang dapat menyokong proyek-proyek di ASEAN.

#### 4. Indonesia

- a. Indonesia terutama mengusulkan kerjasama yang erat di bidang energi dengan mengadakan survei, eksplorasi, tukar menukar informasi dan sebagainya.
- b. kerjasama yang erat dalam mensuplai, membeli dan memproduksi bahan-bahan makanan, seperti perdagangan beras dengan Muangthai, stabilitas dan promosi perdagangan bahan-bahan makanan regional. Kerjasama dalam riset, input produksi seperti pupuk dan pestisides dan secara bersama mencari pasar untuk bahan-bahan tersebut.
- c. kerjasama dalam perdagangan meliputi aspek-aspek seperti:
  - perluasan perdagangan antar negara ASEAN di bidang bahan-bahan makanan, energi dan proyek-proyek industri.
  - secara bersama mencari dan menghadapi pasar internasional, seperti pasaran bersama, riset bersama, kebijaksanaan yang sama, dan sebagainya.
  - berusaha dan membantu kegiatan ke arah diversifikasi ekspor negara-negara ASEAN.
- d. mengadakan pendekatan yang sama dalam masalah komoditi dan masalah-masalah internasional lainnya.

#### 5. Muangthai

- a. Muangthai pada dasarnya menyetujui konsep Free Trade Area atas dasar prinsip tepa slira, dan berpendapat bahwa mereka akan dapat mengambil keuntungan dengan terbentuknya AFTA. Mereka mengusulkan penurunan

tarif secara menyeluruh antara 10-15%. Mereka berpendapat bahwa secara umum ASEAN akan menarik keuntungan dengan terbentuknya AFTA dan kerugian-kerugian dapat diatasi melalui suatu sistim kompensasi dan komplementaritas industri. Mereka juga membicarakan efek polarisasi, yaitu adanya AFTA akan menarik lebih banyak investor.

- b. agar ASEAN dapat memproduksi barang-barang modal dan intermediate bahan mentah, diusulkan agar ASEAN mencapai persetujuan package deal dan complementary industries (sesuai dengan usul Team PBB).
- c. adanya kerjasama moneter termasuk ASEAN Clearing Union, persetujuan mengenai neraca pembayaran, pembiayaan pembangunan dan sebagainya.

## VI. IKHTISAR USUL-USUL

Berbagai usul yang diajukan oleh para analis dan pejabat ASEAN dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Usul Malaysia, Pilipina dan Muangthai banyak sekali mengambil inspirasi dari laporan Team PBB dan mendukung sepenuhnya penciptaan ASEAN Free Trade Area yang bersifat step-by-step dan item-by-item, tetapi memberi jangka waktu yang tertentu, misalnya tahun 1990 (sama dengan yang ditargetkan Team PBB). Mereka hendak memberikan kepada kerjasama ASEAN suatu *sense of timing* dan *sense of urgency*.
2. Usul-usul lain seperti komplementaris industri, package deal, kerjasama di bidang bahan makanan, komoditi dan sebagainya juga diusulkan oleh hampir semua negara ASEAN. Kecuali usul-usul Indonesia, usul negara-negara lain umumnya diilhami oleh laporan Team PBB.
3. Singapura mengusulkan suatu moratorium tarif dan non-tarif sehingga dalam jangka waktu yang disetujui bersama ASEAN hendaknya mencapai suatu ASEAN Free Trade Area dengan mengajukan suatu usul prinsip skema kompensasi karena adanya ketidak-samaan perkembangan ekonomi di antara negara-negara ASEAN.



4. Indonesia lebih menekankan pada kerjasama dalam bidang bahan-bahan makanan, energi, cara menghadapi pasar internasional, kebijaksanaan dalam masalah komoditi dan sebagainya dan tidak menyebut aspek liberalisasi perdagangan (free trade).

## VII. SUATU PANDANGAN

Pandangan kami terhadap masalah AFTA merupakan pandangan pribadi.

Sebelumnya telah kami kutip pandangan Wionzeck yang mengatakan bahwa mungkin sekali kurang berhasilnya LAFTA antara lain disebabkan karena konsep-konsep yang berlaku untuk negara-negara industri seperti EEC tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa studi yang mendalam. Karena itu dalam mencari konsep dan bentuk kerjasama di ASEAN kita hendaknya tidak mengulang apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Bahwa sekarang Brazil berada dalam keadaan yang demikian sulit sehingga harus menciptakan barrier di bidang impor mungkin merupakan suatu indikasi bahwa Free Trade Area pada akhirnya kurang memenuhi harapan para konseptornya.

Kami yakin bahwa dalam konsep Free Trade Area di negara-negara Amerika Latin skema kompensasi juga telah diajukan, tetapi inipun tidak menutup kemungkinan bagi Brazil untuk mencari jalan sendiri dalam penentuan barrier terhadap perdagangan, khususnya impor. Skema kompensasi dapat merupakan arena pertentangan karena suatu negara anggota dengan mudah dapat merasa dirugikan. Prinsip kerjasama antar negara ASEAN pada dasarnya tidak akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan salah satu negara. Sudah barang tentu tidak berarti bahwa dalam mencari bentuk kerjasama kita bisa bersikap ingin menang sendiri, tetapi semangat *give and taken* harus merupakan menyemangati ASEAN.

Dalam hubungan dengan pernyataan tadi, kami kemukakan masalah *equity-debt ratio* yang sudah merupakan suatu kenyataan di dunia internasional (negara-negara industri), tetapi akibatnya kepada negara-negara ASEAN dan khususnya Indonesia mungkin berlainan. Secara teoritis konsep Free Trade Area bagi ahli ekonomi memang mengandung kebenaran, dan



penentuan jangka waktu untuk memberikan sense of urgency juga ada ke-untungannya. Akan tetapi tetap diperlukan adanya suatu studi yang mendalam sebelum kita menerapkan konsep tersebut.

## 1. Masalah equity debt ratio

Dewasa ini perusahaan/industri yang agak besar/menengah sudah tidak lagi dapat mempertahankan diri tanpa adanya pinjaman dari pihak ketiga. Di Jepang hal ini sudah diterima oleh kalangan bank-bank dan lembaga keuangan, tetapi belum terlalu lama direalisasikan di negara-negara berkembang, antara lain Indonesia. Perusahaan dan industri Jepang hanya dapat berkembang antara lain dengan bantuan sepenuhnya dari lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank yang membiayai usaha-usaha dengan bantuan kegiatan ini yang jauh lebih besar daripada modal sahamnya. Demikian juga halnya dengan perusahaan/industri di Jerman. Di Amerika terdapat kombinasi antara pembiayaan melalui sistim perbankan atau dengan mencari modal dari pasar uang dan modal, jadi mencari langsung modal tetap (jangka panjang) dari para investor/publik. Di Inggris sebagian besar perusahaan/industri menarik modal dari investor/publik dan akhir-akhir ini sudah mengikuti pola di Amerika, Jerman dan Jepang. Karena equity-debt ratio sudah merupakan suatu cara kerja bisnis yang nyata, maka di negara-negara industri lembaga-lembaga keuangan serta pasar uang dan modal nasional dan internasional ikut serta dalam memberikan jasa-jasanya. Dengan demikian perusahaan/industri yang menarik modal kerja dalam bentuk pinjaman memperoleh tingkat bunga yang dapat mempertahankan daya saing mereka di pasar internasional.

## 2. Equity-debt ratio dan struktur permodalan

Secara teoritis berarti bahwa jumlah uang dalam bentuk saham jauh lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, sehingga struktur permodalan sudah jauh berubah dibandingkan misalnya dengan 25 tahun yang lalu, di mana masih mungkin perusahaan menarik modal dari berbagai pihak dalam bentuk saham. Struktur permodalan jaman sekarang

sudah mengikutsertakan uang dari publik baik secara langsung dari pasar uang dan modal atau melalui bank-bank. Jika kita meninjau equity-debt ratio maka untuk perusahaan joint venture dan perusahaan/industri domestik, struktur permodalan tidak berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan di dunia internasional. Perusahaan/industri besar mempunyai lebih banyak modal dari pihak ketiga daripada modal sendiri. Hanya di Indonesia terdapat perbedaan yang agak menyolok, yang mungkin mempunyai beberapa konsekuensi harus diperhatikan bersama.

### 3. Struktur permodalan/ratio hutang/modal sendiri di Indonesia

#### a. Perbedaan dengan negara-negara lain

Karena perbedaan struktur permodalan sebagai akibat kenyataan adanya ratio equity dan hutang. Perbedaan utama mungkin modal dari pihak ketiga yang sebagian mungkin diperoleh dari bank-bank negara dalam bentuk modal domestik. Modal kerja yang diperoleh dari bank-bank negara mungkin tidak bersifat jangka panjang (kecuali modal investasi yang mengharuskan pemilik mempunyai 25% seringkali ini mungkin hanya dalam bentuk tanah dan bukan tunai). Seringkali terjadi modal dalam bentuk hutang jangka pendek dimasukkan dalam investasi yang bersifat jangka panjang sehingga menempatkan bank-bank negara dalam suatu keadaan *fait a complit*. Perbedaan kedua dalam hal ini adalah tingkat bunga dan ongkos-ongkos lain yang harus disediakan, pada umumnya mungkin antara 24-30% setahun dibandingkan dengan di luar negeri antara 10-12%. Perbedaan ketiga, joint venture ini dan khususnya joint venture dengan Jepang untuk sebagian besar modal-equity dan modal kerja serta pinjaman disediakan oleh partner luar negeri dalam bentuk package deal. Ini berarti bahwa partner luar negeri sudah memperhitungkan bunga dan margin keuntungan yang dimasukkan dalam bentuk mesin-mesin, peralatan, staf asing, bahan-bahan mentah, royalties, management/technical agreement, dan sebagainya. Dengan demikian *bunga yang bersifat kumulatif* sulit untuk diperkirakan, mungkin sekali tiga atau empat kali tergantung dari bargaining position partner nasional, dari bunga yang kita harus bayar pada bank-bank negara, walaupun dalam bentuk pinjaman bank yang diperoleh melalui joint venture tingkatnya sama dengan dunia internasional.



Tidak saja perhitungan bunga berhenti dengan dibentuknya perusahaan atau industri, akan tetapi hal ini berjalan terus dengan pembelian spare parts (seperti harga mobil Jepang relatif rendah akan tetapi keuntungan diambil kembali dengan harga spare parts yang menurut keterangan relatif lebih tinggi), bahan-bahan mentah, penentuan distributor dan sebagainya sehingga *pembayaran bunga* berjalan terus.

## b. Beberapa konsekwensi

(i) Konsekwensi pertama kita lihat dalam struktur perongkosan. Di samping perusahaan mungkin tidak dalam bentuk large scale, struktur perongkosan dengan *cost of money* yang diperlukan untuk memperoleh modal, modal kerja dan pinjaman untuk segala usaha apakah joint venture, investasi domestik dapat dikatakan cukup tinggi. Kalkulasi harga-harga sudah tentu diperberat dengan ongkos yang tidak dapat dibukukan dan ongkos-ongkos administratif lain untuk melancarkan usaha-usaha/industri. Menurut keterangan para industriawan *cost of money* dan berbagai ongkos administratif merupakan komponen-komponen dalam kalkulasi harga yang menyebabkan industri kita kurang bersifat kompetitif dibandingkan dengan kalkulasi-kalkulasi di luar negeri dan negara-negara ASEAN lain (mungkin struktur perongkosan kita dapat menyamai Muangthai). Akan tetapi perlu dicatat di sini bahwa sampai saat ini belum ada suatu studi yang mempelajari aspek ini secara mendalam. Kami berpendapat bahwa ini penting sekali dalam menentukan sampai berapa jauhkah kita dapat dianggap kurang kompetitif dan sebab-musababnya, sehingga secara menyeluruh dan lebih cermat kita dapat mempersiapkan diri ke arah pembentukan suatu industri yang dalam perkembangannya dapat ditingkatkan ke arah lebih kompetitif.

(ii) Konsekwensi kedua adalah bahwa perdagangan kita lebih terarah ke negara-negara yang merupakan sumber modal kerja dan modal pinjaman dalam berbagai bentuk seperti package deal. Konsekwensi ini sudah dapat kita lihat dalam meningkatnya perdagangan kita misalnya dengan Jepang (Lihat Tabel 10).

(iii) Konsekwensi ketiga adalah bahwa perusahaan/industri yang berada dalam lingkungan joint venture, bahkan dalam lingkungan investasi domestik unsur luar negeri mengambil peranan yang menentukan dalam kebijaksanaan perusahaan/industri. Jika pimpinan dalam joint venture atau pinjaman dalam investasi domestik masih cukup tinggi, maka pihak luar negeri yang mengarahkan industri, sehingga kita melihat kontinuitas pembelian-pembelian bahan-bahan mentah dari negara asal partner atau peminjam modal, mesin dan sebagainya. Misalnya pembelian bahan mentah dari Jepang dibandingkan dengan pembelian dari Taiwan seringkali dapat berbeda puluhan persen. Ini berarti bahwa pengekanan terhadap industri mungkin sekali karena ada persetujuan masih berjalan kurang lebih 5-10 tahun. Pada waktu kita dapat mengambil alih mayoritas dalam tangan nasional mungkin sekali cara produksi dan sebagainya sudah ketinggalan dengan perkembangan teknologi.

#### 4. Faktor perkembangan lembaga-lembaga nasional

Faktor lain dalam perkembangan perekonomian nasional adalah lembaga-lembaga nasional, khususnya bidang keuangan, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya. Struktur bisnis kita dewasa ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor bisnis masih bersifat atomistik dan belum memperlihatkan kemampuan serta kapasitas untuk dapat bersaing di tingkat regional dan internasional, kecuali beberapa gelintir saja. Dalam hubungan memperkembangkan kerjasama ekonomi ke arah Free Trade Area dalam jangka waktu panjang kita perlu memperhatikan *institutional building*. Karena jika ini tidak dilakukan maka apa yang dicita-citakan oleh para konseptor Free Trade Area tidak akan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan/industri nasional, sebaliknya hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan perusahaan big ten Jepang akan mengambil peranan yang terpenting di negara-negara ASEAN. Tampaknya Menteri Perdagangan Malaysia Yang Mulia Datuk Musa Hitam (lihat *Suara Karya* tanggal 2 Pebruari 1976) mempunyai pendapat yang sama dengan penulis. Tidak saja kita harus memperkembangkan lembaga-lembaga kita di bidang bisnis dan industri, akan tetapi kita juga



harus memperhatikan ketidak-seimbangan yang masih ada antara perkembangan lembaga-lembaga keuangan kita dengan perkembangan-perkembangan yang lebih pesat di bidang industri. Ketidak-seimbangan ini kita sudah melihat akibat-akibat dan konsekwensinya dalam suplai kebutuhan akan pembiayaan, sehingga dalam equity-debt ratio kita harus mengambil dari luar negeri atau dari partner-partner luar negeri.

## VIII. KESIMPULAN

Kami berpendapat bahwa konsep ASEAN Free Trade Area dapat diterima sebagai pemikiran dan prinsip pelaksanaan secara jangka panjang perlu ditentukan sehingga kitapun mempunyai *sense of urgency dan timing*. Jangka waktu panjang ini menurut kami jangan ditentukan sekarang karena kita belum mengetahui secara mendalam aspek-aspek seperti bagaimana dapat mengatasi equity-debt ratio dengan akibat-akibatnya pada struktur perongkosan/kalkulasi harga, penyediaan sumber-sumber dengan cost of money yang lebih kompetitif dan sama dengan dunia internasional. Alangkah baiknya jika ini juga dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya sehingga kita dapat mengadakan suatu studi perbandingan. Juga jangan lupa kita mengadakan studi yang lebih mendalam tentang struktur pertariffan di negara-negara ASEAN termasuk juga aspek non-tariff, sehingga studi perbandingan dapat memberikan bahan yang lebih terperinci. Kemudian jangan dilupakan bahwa *institutional building* di negara ASEAN merupakan aspek yang vital sekali. ASEAN dan khususnya Indonesia harus memperkembangkan lembaga-lembaga keuangan, industri dan mengubah struktur bisnis ke arah menciptakan kekuatan-kekuatan yang lebih besar.

Kesatuan-kesatuan yang lebih besar dan kerjasama erat antara sektor swasta Pemerintah dan birokrasi merupakan suatu keharusan untuk setiap negara ASEAN. Jika pola ini sama dan perkembangan lembaga-lembaga bisnis/keuangan/industri sudah terlihat ke arah persamaan, maka kemungkinan berhasilnya konsep ASEAN Free Trade Area tidak lagi merupakan khayalan.

Akan tetapi jalan ke arah itu bukan jalan yang mudah seperti dilihat oleh beberapa negara ASEAN. Menurut pandangan penulis lebih baik kita mengambil sikap yang lebih hati-hati dan mempelajari berbagai kemungkinan dengan lebih saksama dan akhirnya berhasil (walaupun mungkin memakan waktu), daripada secara tergesa-gesa oleh karena adanya berbagai macam urgency yang didasarkan atas terlalu banyak idealisme, pada akhirnya hanya macet. Menurut pandangan kami kemacetan atau kegagalan akan lebih parah daripada mengambil lebih banyak waktu untuk berpikir dan mempelajari secara mendalam. Kita tidak mempunyai waktu untuk gagal.

Tugas Indonesia dilihat dari sudut ketahanan nasionalnya adalah memperhatikan aspek-aspek di atas sehingga kita secara bersama-sama dan secara nasional dapat mempersiapkan metode, teknik, cara-cara, lembaga-lembaga, kerjasama yang lebih erat dan nyata daripada unsur-unsur pengambilan keputusan dan sebagainya. Dengan demikian secara konsepsional dan sistimatis kita memperlihatkan adanya sense of urgency dan sense of timing.

Demikian beberapa pemikiran yang masih bersifat sementara dan kami tidak mengklaim bahwa kertas kerja ini sudah mencakup semua aspek. Jika kertas kerja kami memberikan dorongan kepada pemikir, ahli strategi, ahli ekonomi, pemimpin bisnis dan industri, maka berarti telah mencapai sasarannya.

## SUMBER-SUMBER

1. *Progress, Problems and Prospects in ASEAN Economic Co-operation : A Malaysian Perspection*, Lin See-yan, Chief Economist of Bank Negara Malaysia, the Central Bank of Malaysia.
2. *Singapore and ASEAN Economic Co-operation*, Lim Chong Yah, University of Singapore.
3. *Some Considerations for Accelerating Economic Cooperation in ASEAN*, Estrella D. Solidum, University of the Philippines.
4. *Progress, Problems and Prospects in ASEAN Economic Co-operation a View*, Prateep Sondysuan dan Vijit Supinit, Assistant Directors, Department of Economic Research, Bank of Thailand.
5. *Economic Cooperation for ASEAN*, United Nations Study Team.



TABLE I

=====

PER CAPITA GNP, POPULATION GROWTH RATE AND SIZE OF MANUFACTURING SECTOR  
IN ASEAN COUNTRIES

(1) Country	(2) Per Capita GNP (1974) (US\$)	(3) Population Growth Rate (1974)	(4) Relative Size of Manufacturing Sector in relation to GDP (1973)
Singapore	2,465	1.37	24.8
Malaysia	723	2.54	14.8
Philippines	338	3.08	17.4
Thailand	292	3.09	17.1
Indonesia	123 (1973)	2.40	8.6

=====

Source: Columns (2) and (3), from Statistical Appendix.

Column (4) from United Nations, Monthly Bulletin of Statistics,  
Vol. 29, No. 9, Sept. 1975, pp. 207-209.

Dikutip dari paper Prof. Lim Chong Yah

TABLE III

=====

VALUE OF EXTERNAL TRADE OF ASEAN COUNTRIES, 1974  
(US\$ million)

Country	Imports	Exports	Total
Singapore	8,379	5,810	14,189
Indonesia	3,842	7,426	11,268
Malaysia	4,155	4,231	8,386
Philippines	3,436	2,671	6,107
Thailand	3,090	2,470	5,560

=====

Source: Statistical Appendix.

Dikutip dari paper Prof. Lim Chong Yah

TABLE II

## STATISTICAL APPENDIX MAIN MACRO ECONOMIC INDICATORS OF ASEAN COUNTRIES

Indicator	Country	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand
Population [Ann. Growth Rate] (Millions)	1974	127.59 (2.40)	11.70 (2.54)	41.46 (3.08)	2.22 (1.37)	41.02 (3.09)
Land Area (sq. km)		1,491,564	332,633	300,000	581	514,000
GNP (Millions of US\$)	1972 1973 1974	10,612.05 15,368.67 1974	4,683.71 6,783.85 8,458.15	8,349.40 10,388.72 13,992.36	2,861.85 4,058.24 5,471.25	7,637.61 9,191.66 11,976.44
Per Capita GNP (US\$)	1972 1973 1974	87.25 123.34 1974	425.41 594.55 722.92	213.87 258.30 337.49	1,331.09 1,853.08 2,464.53	197.97 231.00 291.96
GDP, 1970 Prices [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	9,178.31 (6.55) 10,026.51 (9.24) 1974	4,119.28 (7.10) 5,190.46 (9.68)	6,661.88 (4.43) 7,247.58 (9.36) 7,250.74 (5.19)	2,712.75 (13.43) 3,422.91 (11.41) 3,918.72 (6.21)	7,209.48 (3.88) 8,234.11 (11.19) 8,455.46 (2.69)
Per Capita GDP, 1970 Prices [Ann. Growth Rate] (US\$)	1972 1973 1974	75.46 (3.27) 80.47 (6.64) 1974	374.14 (4.18) 454.90 (5.83)	170.64 (1.43) 179.80 (6.15) 174.89 (2.04)	1,261.74 (11.32) 1,562.97 (9.39) 1,765.19 (4.78)	186.87 (0.64) 206.94 (7.81) 206.13 (-0.39)
Total Reserves (Millions of US\$)	1973 Dec. 1974 Dec. 1975	807 1,492 569 (Aug.)	1,342 1,618 1,461 (Aug.)	1,038 1,504 1,493 (Sept.)	2,286 2,816 3,049 (Mar.)	1,306 1,858 1,895 (Sept.)
Exports (F.O.B.) [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	1,778 (44.08) 3,211 (80.60) 7,426 (131.27)	1,717 (4.63) 2,987 (73.97) 4,231 (41.65)	1,105 (-1.52) 1,788 (61.81) 2,671 (49.38)	2,189 (24.16) 3,663 (67.34) 5,810 (58.61)	1,081 (30.08) 1,564 (44.68) 2,470 (57.93)
Imports (C.I.F.) [Ann. Growth Rate] (Millions of US\$)	1972 1973 1974	1,562 (41.61) 2,729 (74.71) 3,842 (40.78)	1,637 (13.84) 2,504 (52.96) 4,155 (65.93)	1,366 (2.71) 1,773 (29.80) 3,436 (93.80)	3,394 (19.46) 5,142 (51.50) 8,379 (62.95)	1,484 (15.40) 2,049 (38.07) 3,090 (50.81)

Sources: All statistics except on land area are adapted from statistical tables prepared by the Secretariat of the Japanese Asian Club for Promoting Economic and Cultural Communication (ACPECC) for the Second Asian Roundtable Conference in Tokyo, November 26-28, 1975.

Land area statistics are obtained from Asia Research Bulletin, Vol. 4, No. 10, March 31st, 1975, pp. 64-65.

Dikutip dari paper Dr. Lin See-yan.

TABLE IV

## GROWTH IN INTRA-ASEAN TRADE

Year	Intra-ASEAN Imports <sup>1</sup>			Intra-ASEAN Exports <sup>2</sup>			Total Intra-ASEAN Trade		
	Per cent		Share of ASEAN's total world imports	SDR million	Per cent		SDR million	Per cent	
	SDR million	Annual growth			Annual growth	Share of ASEAN's total world exports		Annual growth	Share of ASEAN's total world trade
1970	1,073.9		14.6	1,277.5		20.8	2,351.4		17.4
1971	1,064.6	- 0.1	13.8	1,295.9	+ 1.4	20.4	2,360.5	+ 0.4	16.8
1972	1,220.3	+14.6	14.1	1,363.1	+ 5.2	18.8	2,583.4	+ 9.4	16.2
1973	1,615.3	+32.4	13.7	1,941.2	+42.4	17.6	3,556.5	+37.7	15.6
1974	2,136.6	+32.3	11.2	2,640.3	+36.0	14.3	4,776.9	+34.3	12.8

Source: IMF/IBRD, Direction of Trade, Annual 1970 - 74

<sup>1</sup> Based on imports of each ASEAN country. See Table 2<sup>2</sup> Based on exports of each ASEAN country.



TABLE V

## MATRIX OF INTRA-ASEAN TRADE GROSS IMPORTS IN SDR MILLION

1970

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	67.8	29.5	152.7	19.3	269.3
Malaysia	6.2	-	28.2	458.5	7.0	499.9
Philippines	1.6	2.2	-	8.8	3.3	15.9
Singapore	56.8	104.7	4.7	-	12.6	178.8
Thailand	11.1	49.8	0.3	48.8	-	110.0
ASEAN	75.7	224.5	62.7	668.8	42.2	1,073.9

1973

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	50.1	1.6	224.7	6.6	293.0
Malaysia	12.0	-	12.7	696.6	11.4	732.7
Philippines	11.6	7.1	-	13.2	4.0	35.9
Singapore	110.9	155.5	7.2	-	24.1	297.7
Thailand	62.3	88.0	9.6	106.1	-	266.0
ASEAN	196.8	300.7	31.1	1,040.6	46.1	1,615.3

1974

Imports from \ Imports of	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	ASEAN
Indonesia	-	78.6	4.0	117.0	4.5	204.1
Malaysia	9.8	-	23.7	885.5	23.2	942.2
Philippines	9.7	15.1	-	18.9	3.4	47.1
Singapore	204.6	282.0	23.6	-	45.1	555.3
Thailand	60.2	119.7	13.2	194.8	-	387.9
ASEAN	284.3	495.4	64.5	1,216.2	76.2	2,136.6

Note: (i) Read downwards: the figures represent the imports of the respective ASEAN country from the other members.

(ii) Read across: the figures represent the exports of the respective ASEAN country to the other members since it is assumed that the recorded imports of one country are the exports of other members.

Source: IMF/IBRD, Direction of Trade, Annual 1970-74

TABLE VI

## MATRIX OF ASEAN TRADE BALANCES

(based on gross imports<sup>1</sup> in SDR million)

Trade Balance of	With Indonesia	With Malaysia	With Philippines	With Singapore	With Thailand	With ASEAN
1970						
Indonesia	-	61.6	27.9	95.9	8.2	193.6
Malaysia	- 61.6	-	26.0	353.8	- 42.8	275.4
Philippines	- 27.9	- 26.0	-	4.1	3.0	- 46.8
Singapore	- 95.9	-353.8	- 4.1	-	- 36.2	-490.0
Thailand	- 8.2	42.8	- 3.0	36.2	-	67.8
1973						
Indonesia	-	38.1	- 10.0	113.8	- 55.7	86.2
Malaysia	- 38.1	-	5.6	541.1	- 76.6	432.0
Philippines	10.0	- 5.6	-	5.0	- 5.6	3.8
Singapore	-113.8	-541.1	- 5.0	-	- 82.0	-741.9
Thailand	55.7	76.6	5.6	82.0	-	219.9
1974						
Indonesia	-	68.8	- 5.7	- 87.6	- 55.7	- 80.2
Malaysia	- 68.8	-	8.6	603.5	- 96.5	446.8
Philippines	5.7	- 8.6	-	4.7	- 9.8	- 17.4
Singapore	87.6	-603.5	4.7	-	-149.7	-660.9
Thailand	55.7	96.5	9.8	149.7	-	311.7

<sup>1</sup> Based on the import data (c.i.f.) of each individual ASEAN country, that is, the exports of each ASEAN country are assumed to be the same as the recorded imports of its partners.

Source: IMF/IBRD, Direction of Trade, Annual 1970-74



TABLE VII

## MALAYSIA: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD (SDR million)

	Indonesia				Philippines				Singapore				Thailand				Total ASEAN				Total World				Total ASEAN/ Total World per cent			
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
<b>A. IMPORTS (CIF)</b>																												
SITC CODE																												
0 Food	11.7	19.1			0.2	5.3	17.7	27.0	36.5	89.2	66.1	140.6	257.0	547.6	25.7	25.7									25.7	25.7		
1 Beverages and Tobacco	0.1	0.1			-	-	1.4	1.1	-	0.2	1.5	1.4	30.3	39.7	5.0	3.5									5.0	3.5		
2 Crude Materials Inedible	53.8	58.2	0.8	1.0	0.8	1.0	6.9	5.1	11.5	21.7	73.0	86.0	105.2	187.6	69.4	45.8									69.4	45.8		
3 Mineral Fuels	0.3	0.4	0.2	-	0.2	-	26.6	114.5	0.1	0.2	27.2	115.1	169.0	346.7	16.1	33.2									16.1	33.2		
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	-	-	0.1	0.4	0.1	0.4	1.9	2.2	-	0.2	2.0	2.8	7.8	15.2	25.6	18.4									25.6	18.4		
5 Chemicals	0.8	0.9	0.2	1.1	0.2	1.1	5.6	13.2	0.2	1.0	6.8	16.2	102.1	303.7	6.7	5.3									6.7	5.3		
6 Manufactured Goods	-	0.4	0.3	5.9	0.3	5.9	21.6	36.2	0.7	6.1	22.6	48.6	251.6	644.2	9.0	7.5									9.0	7.5		
7 Machinery and Transport Equipment	-	-	0.2	1.0	0.2	1.0	4.4	40.9	0.2	1.5	4.8	43.4	391.1	1,108.0	1.2	3.9									1.2	3.9		
8 Miscellaneous Manufactured Articles	1.0	1.0	0.1	0.6	0.1	0.6	7.8	30.5	0.3	0.6	9.2	32.7	65.3	193.4	14.1	16.9									14.1	16.9		
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	-	0.1	-	-	-	-	10.7	12.7	0.4	0.5	11.1	13.3	21.4	31.2	51.9	42.6									51.9	42.6		
0 to 9 Total	67.7	80.2	2.1	15.3	2.1	15.3	104.6	283.4	49.9	121.2	224.3	500.1	1,400.8	3,417.3	16.0	14.6									16.0	14.6		
<b>B. EXPORTS (FOB)</b>																												
SITC CODE																												
0 Food	0.4	0.3	0.1	1.0	0.1	1.0	39.7	73.5	0.8	1.8	41.0	76.6	92.8	177.5	44.2	43.2									44.2	43.2		
1 Beverages and Tobacco	-	-	1.4	2.2	1.4	2.2	2.4	3.2	-	-	3.8	5.4	7.1	8.4	53.5	64.3									53.5	64.3		
2 Crude Materials Inedible	0.2	0.7	0.1	0.3	0.1	0.3	187.4	300.6	0.2	0.4	187.9	302.0	907.3	1,560.1	20.7	19.4									20.7	19.4		
3 Mineral Fuels	3.3	0.7	22.4	-	22.4	-	55.2	144.8	8.5	23.9	89.4	187.2	119.4	287.8	74.9	65.1									74.9	65.1		
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	-	-	0.6	0.4	0.6	0.4	30.3	108.6	0.3	0.1	31.2	109.4	101.2	473.3	30.8	23.1									30.8	23.1		
5 Chemicals	0.5	2.4	0.1	1.1	0.1	1.1	4.0	11.0	1.5	1.0	6.9	16.3	11.9	27.6	50.0	59.1									50.0	59.1		
6 Manufactured Goods	4.7	4.5	3.9	5.7	3.9	5.7	15.2	37.4	1.1	1.3	22.9	48.9	306.4	679.3	5.9	7.2									5.9	7.2		
7 Machinery and Transport Equipment	2.6	6.0	0.2	0.4	0.2	0.4	17.4	54.6	1.5	2.5	21.7	64.3	27.5	137.9	78.9	46.6									78.9	46.6		
8 Miscellaneous Manufactured Articles	0.4	1.2	0.4	1.2	0.4	1.2	5.8	24.3	0.3	0.3	6.9	27.5	14.2	136.8	48.6	19.7									48.6	19.7		
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	0.5	1.4	-	0.1	-	0.1	5.7	4.1	0.3	0.4	6.5	6.0	18.9	33.4	34.4	18.0									34.4	18.0		
0 to 9 Total	10.6	18.0	29.1	29.7	29.1	29.7	363.9	762.9	14.5	32.5	418.1	843.1	1,686.7	3,522.1	24.8	23.9									24.8	23.9		
C. TRADE BALANCE:	-57.1	-62.2	27.0	14.4	27.0	14.4	259.3	479.5	-35.4	-88.7	193.8	343.0	285.9	104.8	-	-									-	-		

Source: Department of Statistics, Malaysia



TABLE VIII

## PHILIPPINES: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD (SDR million)

SITC CODE	Indonesia				Malaysia				Singapore				Thailand				Total ASEAN				Total World				Total ASEAN/ Total World per cent			
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
<b>A. IMPORTS (CIF)</b>																												
0 Food	....	0.9	....	0.2	....	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12.8	0.2	14.0	121.8	293.7	0.2	4.8	....	....	....	....	....	....	....	....
1 Beverages and Tobacco	....	-	....	-	....	-	-	-	-	-	-	-	-	....	....	-	9.2	15.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2 Crude Materials Inedible	....	0.2	....	0.5	....	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.2	2.1	70.7	140.2	0.3	1.5	....	....	....	....	....	....	....	....
3 Mineral Fuels	29.0	2.6	24.1	16.6	....	0.3	16.8	....	....	....	....	....	....	-	53.4	36.0	144.5	599.9	37.0	6.1	....	....	....	....	....	....	....	....
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	0.4	0.2	0.5	1.1	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0.9	1.3	6.3	10.9	13.6	11.9	....	....	....	....	....	....	....	....
5 Chemicals	....	-	....	0.1	....	0.4	2.3	....	....	....	....	....	....	....	0.5	2.3	145.4	467.6	0.3	0.5	....	....	....	....	....	....	....	....
6 Manufactured Goods	....	0.1	....	2.6	....	0.4	1.3	....	....	....	....	....	....	0.1	3.0	6.8	249.0	485.4	1.2	1.4	....	....	....	....	....	....	....	....
7 Machinery and Transport Equipment	....	0.1	....	0.1	....	3.0	2.2	....	....	....	....	....	....	0.2	3.3	2.5	426.4	707.1	0.8	0.4	....	....	....	....	....	....	....	....
8 Miscellaneous Manufactured Articles	....	-	....	....	....	0.1	0.3	....	....	....	....	....	....	....	0.1	0.3	31.5	54.9	0.3	0.6	....	....	....	....	....	....	....	....
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	0.1	....	....	0.1	....	0.1	0.6	....	....	....	....	....	....	0.1	0.2	0.8	5.2	118.8	3.9	0.7	....	....	....	....	....	....	....	....
0 - 9 Total	29.5	4.1	27.4	23.9	4.5	23.9	0.4	14.2	61.8	66.1	1,210.3	2,884.0	5.1	2.3	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
<b>B. EXPORTS (FOB)</b>																												
0 Food	....	0.2	0.1	0.2	....	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9	272.3	807.3	0.1	0.1	....	....	....	....	....	....	....	....
1 Beverages and Tobacco	0.2	0.4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0.2	0.4	15.4	26.6	1.3	1.5	....	....	....	....	....	....	....	....
2 Crude Materials Inedible	0.1	....	0.1	....	....	0.1	0.6	....	....	....	....	....	....	....	0.3	0.6	571.4	742.7	0.05	0.1	....	....	....	....	....	....	....	....
3 Mineral Fuels	0.2	0.1	0.1	0.1	....	5.9	2.2	....	....	....	....	....	....	0.1	6.2	2.4	17.3	14.4	35.8	16.7	....	....	....	....	....	....	....	....
4 Animal and Vegetable Oils and Fats	....	....	....	....	....	....	2.7	....	....	....	....	....	....	....	....	2.7	96.0	319.6	....	0.8	....	....	....	....	....	....	....	....
5 Chemicals	0.3	1.5	0.1	0.5	....	0.2	0.8	....	....	....	....	....	....	1.4	1.6	4.2	5.2	12.6	30.8	33.3	....	....	....	....	....	....	....	....
6 Manufactured Goods	0.3	2.3	0.1	2.2	....	0.7	6.2	1.0	0.4	2.1	11.1	68.9	191.2	30.8	2.1	11.1	68.9	191.2	3.1	5.8	....	....	....	....	....	....	....	....
7 Machinery and Transport Equipment	0.1	2.2	0.1	0.4	....	....	0.3	0.3	0.2	0.5	3.1	6.3	62.5	49.2	0.8	3.1	0.8	6.3	3.1	5.8	....	....	....	....	....	....	....	....
8 Miscellaneous Manufactured Articles	0.5	0.9	....	0.3	....	0.2	1.4	0.8	0.5	1.5	3.1	55.1	16.3	5.6	1.5	3.1	9.2	55.1	16.3	5.6	....	....	....	....	....	....	....	....
9 Miscellaneous Transactions and Commodities	....	0.3	....	0.2	....	0.1	0.7	....	....	....	....	....	....	0.2	0.1	1.4	5.2	90.3	1.9	1.6	....	....	....	....	....	....	....	....
0 - 9 Total	1.7	7.9	0.6	3.8	7.3	15.3	3.2	2.9	12.8	29.9	1,061.7	2,266.1	1.2	1.3	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
<b>C. TRADE BALANCE</b>																												
.... Negligible	-27.8	3.8	-26.8	-20.1	2.8	8.6	2.8	-11.3	-49.0	-36.2	-148.6	-617.9	-	-	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

Sources: Official Publications, the Philippines

TABLE IX

## INDONESIA, SINGAPORE AND THAILAND: TRADE WITH ASEAN COUNTRIES AND WORLD

(SDR million)

I. Indonesia	Malaysia		Philippines		Singapore		Thailand		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
A. Imports (CIF)	6.2	9.8	1.6	9.7	56.8	204.6	11.1	60.2	75.7	284.3	1,001.5	3,093.2	7.6	9.2
B. Exports (FOB)	88.7	58.4	25.6	1.9	171.9	457.8	0.2	6.8	286.4	524.9	1,160.7	6,138.1	24.7	8.6
C. Trade Balance	82.5	48.6	24.0	- 7.8	115.1	253.2	-10.9	-53.4	210.6	240.6	159.2	3,044.9	-	-
II. Singapore	Indonesia		Malaysia		Philippines		Thailand		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
A. Imports (CIF)	152.7	117.0	458.5	885.5	8.8	18.9	48.8	194.8	668.8	1,216.2	2,461.3	7,080.0	27.2	17.2
B. Exports (FOB)	59.1	58.7	339.7	654.0	4.2	35.3	51.2	114.3	454.2	862.3	1,553.7	4,519.0	29.2	19.1
C. Trade Balance	-93.6	-58.3	-118.8	-231.5	-4.6	16.4	2.4	-80.5	-214.6	-353.6	-907.6	-2,561.0	-	-
III. Thailand	Indonesia		Malaysia		Philippines		Singapore		Total ASEAN		Total World		Total ASEAN/ Total World per cent	
	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974	1970	1974
A. Imports (CIF)	19.3	4.5	7.0	23.2	3.3	3.4	12.6	45.1	42.2	76.2	1,298.5	2,649.6	3.3	2.9
B. Exports (FOB)	16.4	78.1	39.9	103.8	0.8	18.4	49.0	189.9	106.1	390.2	710.2	2,053.8	14.9	19.0
C. Trade Balance	-2.9	73.6	32.9	80.6	-2.5	15.0	36.4	144.8	63.9	314.0	-588.3	-595.8	-	-

Source: IMF/IERD, Direction of Trade, Annual 1970-74

TABLE X

## DIRECTOR OF TRADE 1973

Importing Countries		(Million US Dollars)														
Exporting Countries	Importing Countries	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Sub-Total	U.S.	Japan	EEC	Socialist Countries	Australia S. Africa	Middle East	Other Asia	Others *	Total
Indonesia		-	34.3	1.9	341.0	1.1	378.30	465.4	1,707.4	323.7	15.9	54.9	-	169.1	96.7	3,211.4
Malaysia		14.5	-	15.3	693.9	18.7	742.40	322.9	539.9	652.9	222.5	81.3	36.3	203.5	182.3	2,984.0
Philippines		14.3	5.6	-	14.8	4.2	38.90	686.7	679.9	230.5	14.5	24.0	3.0	121.4	87.4	1,886.3
Singapore		133.8	187.5	8.7	-	29.5	359.5	612.9	238.8	611.8	187.4	162.4	82.3	928.5	370.0	3,603.6
Thailand		75.1	95.7	11.6	130.6	-	313.0	160.1	412.7	268.4	6.7	17.4	39.6	281.8	81.40	1,581.1
Sub-total		237.7	323.1	37.5	-180.3	53.5										
U.S.		512.6	205.0	506.7	765.4	290.7										
Japan		799.7	541.2	561.0	926.9	740.8										
EEC		477.1	508.9	227.3	713.3	411.6										
Socialist Countries		72.2	165.2	25.8	266.1	14.5										
Australia, S. Africa		90.2	202.2	104.2	199.0	90.8										
Middle East		-	66.5	198.8	540.4	120.4										
Other Asia		419.5	239.8	55.2	334.3	148.2										
Others*		120.8	137.9	73.2	141.4	204.2										
Total		2,729.8	2,389.8	1,789.7	5,067.1	2,074.7										

\* Including errors

Source: Basic data from Direction of Trade Yearbook.





TABLE XII

## TRADE BETWEEN COUNTRIES AS PERCENTAGE OF TOTAL TRADE 1973

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand	Sub-Total	U.S.	Japan	EEC	Socialist Countries	Australia Asia S. Africa	Middle East	Other Asia	Others	Total
Indonesia	-	0.82	0.27	7.99	1.28	10.37	16.46	42.20	13.48	1.48	2.44	-	9.91	3.66	100.0
Malaysia	0.91	-	0.38	16.40	2.13	19.83	9.82	20.12	21.62	7.21	5.28	1.91	8.25	5.96	100.0
Philippines	0.44	0.57	-	0.64	0.43	2.08	32.46	33.75	12.45	1.10	3.49	5.47	4.80	4.37	100.0
Singapore	5.48	10.17	0.27	-	1.85	17.76	15.90	14.02	15.28	5.23	4.17	7.18	14.56	5.90	100.0
Thailand	2.08	3.13	0.43	4.38	-	10.02	12.33	31.55	18.60	0.58	2.96	4.37	11.76	7.81	100.0
Total	2.26	3.90	0.28	5.64	1.34	13.42	16.58	26.36	16.20	3.63	3.76	3.96	10.62	5.48	100.0

Source: As Table II





# ASEAN SESUDAH KTT

J. Soedjati DJIWANDONO

## I

Gagasan mengenai kemungkinan dan perlunya diselenggarakan suatu pertemuan kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN mulai dilontarkan dan hangat dibicarakan dalam bulan April tahun yang lalu, pada saat-saat perkembangan yang terjadi di semenanjung Indocina tengah mencapai puncaknya hingga sampai pada jatuhnya Phnom Penh dan Saigon ke tangan komunis, yang praktis telah mengakhiri peperangan yang telah berlarut-larut di semenanjung itu selama beberapa puluh tahun.

Sepintas lalu kelihatan bahwa perkembangan di Indocina itulah, yang memang dapat dianggap sebagai suatu titik tolak dan suatu lembaran baru dalam sejarah Asia Tenggara, yang telah mendorong timbulnya gagasan tentang KTT ASEAN, seakan-akan sebagai suatu reaksi terhadap perkembangan baru itu. Demikianlah Presiden Ferdinand Marcos dari Pilipina mula-mula melontarkan gagasan itu pada tanggal 17 April tahun yang lalu *untuk membahas implikasi-implikasi peristiwa yang terjadi di Indocina dan perkembangan di Asia lainnya.*<sup>1</sup>

Adanya perbedaan pendapat tentang hal ini pada permulaan, seperti kelihatan dari pernyataan PM Lee Kuan Yew dari Singapura bahwa *dewasa ini belum waktunya untuk melangsungkan suatu KTT darurat ASEAN sehubungan dengan perkembangan Indocina*<sup>2</sup>, nampaknya lebih memperkuat kesan di atas.

---

<sup>1</sup> *Antara*, 18 April 1975/A

<sup>2</sup> *Sinar Harapan*, 24 April 1975

Di samping itu, nampaknya memang logis jika suatu KTT ASEAN di-langsungkan untuk menanggapi bersama atau menentukan sikap bersama terhadap perkembangan di Indocina, justru oleh karena kelihatan adanya perbedaan sikap, pandangan dan penilaian, walaupun perbedaan itu mungkin hanya dalam nuansa dan tidak bersifat prinsipil. Dan walaupun perbedaan itu ada, hal itu bisa dimengerti, mengingat bahwa meskipun apa yang terjadi di Indocina mungkin telah dapat diduga sebelumnya, cepatnya kejadian-kejadian itu sendiri nampaknya di luar dugaan banyak orang, sehingga cukup mengagetkan dan menimbulkan reaksi-reaksi yang memberi kesan kurang siapnya negara-negara anggota ASEAN menghadapi perkembangan dan realitas baru yang terjadi di Indocina.

Dalam hubungan demikianlah reaksi terhadap KTT ASEAN seperti yang dinyatakan oleh harian Angkatan Bersenjata Vietnam Nhan Dan pada hari menjelang dibukanya KTT ASEAN, yang menuduh seakan-akan ASEAN didalangi oleh kekuatan AS dan menuju ke arah terbentuknya persekutuan militer baru yang ditujukan terhadap *gerakan-gerakan revolusioner* di Indocina<sup>1</sup>, bisa dimengerti.

Akan tetapi dari hasil-hasil yang ditelorkan oleh KTT ASEAN di Bali nyata kelihatan bahwa diselenggarakannya KTT itu bukanlah khususnya sebagai reaksi semata-mata terhadap realitas baru di Indocina, apalagi persekongkolan negara-negara ASEAN terhadap negara-negara tetangganya di Indocina. Oleh karena itu, meskipun mungkin bisa dikatakan bahwa perkembangan di Indocina telah menambah urgensi dan sedikit banyak mempercepat diwujudkannya KTT ASEAN, penilaian akan arti dan pentingnya KTT ASEAN dalam tulisan ini tidak akan dilakukan semata-mata dalam kaitannya dengan perkembangan di Indocina, melainkan terutama dari segi seberapa jauh KTT ASEAN memainkan peranan dalam usaha penggalangan dan konsolidasi kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara ini. Benarkah ia merupakan suatu langkah maju, dan apakah kiranya prospek dan masalah-masalah yang masih harus dihadapi oleh ASEAN dalam masa-masa mendatang

---

<sup>1</sup> Berita Yudha, 25 Pebruari 1976



*Ministries. The Heads of State and Government have now given their imprimatur to ASEAN's wider role in our economic planning and development.*<sup>1</sup> Dan dalam bagian terakhir daripada mukadimah Declaration of ASEAN Concord para kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN *Undertake to consolidate the achievements of ASEAN .....*

### III

Kalau selama ini ASEAN terutama adalah bentuk kerjasama regional dengan titik berat terutama pada bidang-bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, hal itu lebih dikukuhkan dan lebih terperinci lagi sejak KTT di Bali, seperti dapat dilihat pada program aksi yang digariskan dalam Declaration of ASEAN Concord.

Hingga menjelang KTT ASEAN, kelihatan sekali adanya sikap hati-hati pada para pemimpin negara ASEAN dalam membicarakan masalah-masalah dalam rangka kerjasama ASEAN yang berbau politik, apalagi masalah-masalah dalam bidang keamanan dan pertahanan, yang biasanya dianggap sensitif dan mudah menimbulkan salah pengertian, salah penafsiran, atau kecurigaan. Di samping itu telah seringkali ditekankan bahwa ASEAN adalah kerjasama regional dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan bukan kerjasama dalam bidang politik, keamanan dan pertahanan, apalagi dalam pengertian militer. Dan meskipun Deklarasi Bangkok yang melahirkan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 sebenarnya merupakan suatu hasil keputusan politik, perkataan *politik* dalam seluruh deklarasi itu hanya dipergunakan sekali, yaitu dalam menunjuk kedudukan resmi Adam Malik waktu itu sebagai anggota Presidium Kabinet untuk urusan politik, yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kerjasama dalam bidang politik.

Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa selama ini tidak dilakukan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang politik, bahkan dalam bidang keamanan dan pertahanan. Tetapi

---

<sup>1</sup> Meeting of ASEAN Heads of Government, ASEAN National Secretariat of Indonesia.



sesudah itu. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengajukan secara tegas dan positif bentuk-bentuk penyelesaian atas masalah-masalah yang dianggapnya ada, tetapi untuk melontarkan problematik-problematik untuk mendorong pemikiran dan pembicaraan lebih lanjut ke arah suksesnya kerjasama regional ASEAN mencapai cita-cita yang telah diikrarkan bersama.

## II

Mengingat adanya perbedaan-perbedaan pendapat pada taraf permulaan, bukan saja tentang perlu dan urgensinya suatu KTT ASEAN, tetapi juga tentang tempat, waktu, dan pokok-pokok persoalan yang perlu dibahas dalam KTT ASEAN, yang memakan waktu untuk diatasi melalui kesepakatan, ditambah lagi adanya persoalan-persoalan antara negara-negara anggota ASEAN yang mengandung benih-benih pertikaian dan perpecahan misalnya yang berkisar pada masalah Sabah dan apa yang dikenal sebagai wilayah perdagangan bebas, maka sebenarnya kenyataan bahwa semua kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN berhasil bertemu secara bersama-sama itu sendiri sudah merupakan suatu sukses yang cukup membesarkan hati. Ia merupakan suatu pencerminan komitmen negara-negara anggota ASEAN pada perhimpunan itu, dan suatu pencerminan semangat dan solidaritas ASEAN yang sudah mulai tumbuh nyata. Dalam bagian permulaan daripada mukadimah Declaration of ASEAN Concord dinyatakan bahwa para kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN *Reaffirm their commitment to the Declarations of ..... Bangkok and Kuala Lumpur, .....*

Tetapi lebih dari itu, ditandatanganinya dua dokumen penting dan yang pertama oleh kepala-kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN, yaitu Declaration of ASEAN Concord and Treaty of Amity and Cooperation, merupakan suatu pengukuhan atas kerjasama regional ASEAN yang selama ini telah disepakati dan dilaksanakan, sehingga bisa dikatakan bahwa KTT ASEAN telah merupakan peristiwa yang memahkotai kerjasama regional ASEAN, yang kini telah melewati sewindu usianya. Dalam sambutannya pada penutupan KTT ASEAN di Bali, PM Lee Kuan Yew mengatakan antara lain: *From now on, ASEAN will merit more than a desk in our respective Foreign*

khususnya kerjasama dalam bidang politik ini terutama dilakukan secara bilateral antar negara-negara anggota ASEAN, atau walaupun secara multilateral dilakukan secara tidak resmi dalam pertemuan-pertemuan informil yang biasa dilakukan setelah pertemuan Menlu-menlu ASEAN secara formil. Kerjasama itu misalnya yang berisikan konsultasi-konsultasi seperti yang menyangkut masalah hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan RRC.

Satu-satunya bentuk resmi yang merupakan perwujudan kerjasama dalam bidang politik dalam rangka ASEAN sebelum KTT nampaknya adalah Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 tentang netralisasi, yang disusul pula dengan pertemuan pejabat-pejabat senior ASEAN tanggal 6-8 Juli 1972, di mana tercapai pengertian bersama tentang Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral.

KTT ASEAN di Bali tidak saja mengukuhkan bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang politik antara negara-negara anggota yang hingga saat itu telah dilakukan, tetapi bahkan secara resmi memasukkan bidang politik sebagai salah satu bidang kerjasama dalam rangka ASEAN. Dan dalam Programme of Action yang digariskan dalam Declaration of ASEAN Concord, bidang politik secara tegas disebutkan sebagai bagian pertama dengan perincian dalam kata-kata yang cukup jelas. Dengan demikian nyata bahwa KTT di Bali tidak saja telah meningkatkan dan mengukuhkan kerjasama ASEAN secara keseluruhan, tetapi ia telah pula memperluas bidang kerjasama dalam rangka perhimpunan itu. Bagian akhir mukadimah Declaration of ASEAN Concord selengkapnya berbunyi: *Undertake to consolidate the achievements of ASEAN and expand ASEAN cooperation in the economic, social, cultural and political fields.*

#### IV

Kalau kerjasama dalam bidang politik telah mencapai banyak kemajuan dan KTT di Bali telah secara nyata dan resmi memperluas bidang kerjasama regional hingga meliputi bidang politik itu dan meningkatkannya sampai ke taraf regional dalam rangka ASEAN, tidak demikianlah halnya dengan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan, meskipun



sebenarnya aspek keamanan merupakan salah satu pertimbangan penting yang mendasari berdirinya ASEAN, seperti terlihat dalam Deklarasi Bangkok yang antara lain menyatakan: *Considering that ..... they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their peoples;*

Memang benar, bahwa meskipun seperti sering pula ditegaskan bahwa kerjasama ASEAN bukanlah kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan, apalagi bukan suatu pakta militer dan tidak menuju ke arah terciptanya suatu pakta militer, kerjasama dalam bidang itu telah dilakukan pula selama ini antara negara-negara anggota ASEAN atas dasar bilateral ataupun bahkan multilateral, tetapi tidak pernah dalam rangka ASEAN dan meliputi semua negara anggota ASEAN secara bersama-sama.

Demikianlah misalnya telah ada kerjasama antara Malaysia dan Muangthai dalam operasi di perbatasan antara kedua negara terhadap kaum komunis, yang bahkan sudah dimulai sejak tahun 1964, sebelum lahirnya ASEAN; begitu pula telah dilakukan kerjasama yang serupa antara Malaysia dan Indonesia; kerjasama antara Pilipina dan Indonesia dalam patroli perbatasan dan lintas batas antara kedua negara, yang dimaksudkan untuk menanggulangi penyelundupan, pencurian ikan, bajak laut dan ke luar masuknya orang-orang di perbatasan secara tidak sah;<sup>1</sup> dan bentuk-bentuk lainnya daripada kerjasama bilateral dalam bidang keamanan dan pertahanan seperti pertukaran intelijen dan latihan perang bersama.

Akan tetapi kalau seperti disinggung di atas, kerjasama dalam bidang politik telah dikuatkan dan ditingkatkan sampai pada tingkat regional dalam rangka ASEAN oleh KTT ASEAN di Bali, KTT di Bali itu tidak meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan sampai ke tingkat regional dalam rangka ASEAN, melainkan sekedar mengukuhkan apa yang hingga saat itu telah dilaksanakan dalam kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan, yaitu kerjasama antara anggota-anggota ASEAN atas

---

<sup>1</sup>Suara Karya, 12-3-1975



dasar bilateral. Paling banter hanya dapat dikatakan bahwa pada KTT di Bali kerjasama dalam bidang-bidang itu baru dibicarakan pada tingkat regional.

Dalam program aksi yang digariskan oleh Declaration of ASEAN Concord, bidang keamanan merupakan bagian terakhir dan hanya dinyatakan dalam satu kalimat: *Continuation of cooperation on a non-ASEAN basis between the member states in security matters in accordance with their mutual needs and interests*, jadi menguatkan dan akan meneruskan kerjasama dalam masalah-masalah keamanan antara negara-negara anggota seperti yang hingga saat itu dilakukan, yaitu atas dasar bilateral. Dan memang dalam bagian akhir daripada mukadimah Declaration of ASEAN Concord yang dikutip di atas, yang berisikan perluasan bidang kerjasama hingga meliputi bidang politik, tidak disebut bidang keamanan dan pertahanan.

## V

Hal itu tentu saja tidak berarti bahwa bidang keamanan dan pertahanan tidak penting dan tidak mempunyai tempat dalam kerjasama regional ASEAN. Tidak saja pertimbangan keamanan merupakan sebagian yang penting daripada motivasi bagi pendirian perhimpunan ASEAN seperti dikemukakan di muka, tetapi maksud dan tujuan daripada perhimpunan itu sendiri seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok kiranya tidak akan tercapai jika stabilitas dan keamanan masing-masing negara maupun di wilayah Asia Tenggara ini secara keseluruhan tidak terjamin.

Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kalau begitu ASEAN seharusnya telah mulai terlebih dahulu dengan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas dan keamanan yang diperlukan sebagai syarat tercapainya maksud dan tujuan kerjasama regional di bidang-bidang lain. Justru kalau motif utama yang mendasari didirikannya ASEAN adalah kesadaran akan adanya kepentingan dan masalah-masalah bersama seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi Bangkok, *Mindful of the existence of mutual interests and common problems among the countries of Southeast Asia .....*, maka ASEAN kiranya telah

mulai dengan kerjasama dalam bidang-bidang yang tepat, yaitu yang non-politis dan non-militer atau di luar bidang keamanan dan pertahanan. Bidang-bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tidak begitu sensitif dan tidak begitu mudah cenderung menimbulkan kecurigaan, salah pengertian, dan salah penafsiran dibanding dengan bidang politik, keamanan dan pertahanan. Lagi pula, dalam bidang-bidang inilah kepentingan dan masalah bersama lebih mudah diketemukan dan saling pengertian lebih mudah tercapai serta harapannya lebih besar bahwa hasil-hasil yang lebih nyata akan lebih cepat tercapai dan terasa.

Yang dapat dipersoalkan sekarang adalah apakah perlu dan mungkin kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan yang selama ini dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN atas dasar bilateral itu pada saatnya ditingkatkan sampai pada tingkat regional dalam rangka ASEAN, walaupun malahan tidak dalam rangka wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan.

Kalau telah disepakati bahwa masing-masing negara anggota ASEAN hendak mengembangkan ketahanan nasional dan bersama-sama melalui kerjasama regional hendak mengembangkan ketahanan regional seperti tercermin dalam Declaration of ASEAN Concord yang menyatakan antara lain: *Each member state resolves to eliminate threats ..... to its stability, thus strengthening national and ASEAN resilience*, maka kiranya perlu bahwa pada saatnya kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan antara negara-negara anggota ASEAN yang telah dilakukan hingga kini atas dasar bilateral ditingkatkan sampai pada tingkat regional dalam rangka ASEAN. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian yang luas dan menyeluruh, yang meliputi semua segi kehidupan nasional, termasuk segi keamanan dan pertahanan ataupun militer sebagai unsur-unsur yang integral yang tak terpisahkan. Inilah yang bersama-sama dengan kerjasama ASEAN hendak kita kembangkan menjadi ketahanan regional. Oleh karena itu perlu pula bahwa kerjasama ASEAN semakin ditingkatkan dan diperluas hingga menyeluruh meliputi semua bidang kehidupan nasional dan regional yang vital yang menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan dalam artian yang seluas-luasnya seluruh rakyat wilayah ini, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Dan ini meliputi bidang keamanan dan pertahanan, yang terutama menjadi



tanggung jawab kita bersama, kalau ketahanan nasional dan regional mengandung arti dan berdasarkan prinsip self-reliance, tanpa semata-mata menggantungkan diri pada kekuatan luar. Pasal 12 dari Treaty of Amity and Cooperation berbunyi: *The High Contracting Parties in their efforts to achieve regional prosperity and security, shall endeavour to cooperate in all fields for the promotion of regional resilience, based on the principle of self-confidence, self-reliance, mutual respect, cooperation and solidarity which constitute the foundation for a strong and viable community of nations in Southeast Asia.*

## VI

Andaikata kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan memang perlu pada suatu saat ditingkatkan ke dalam rangka ASEAN, persoalan selanjutnya adalah apakah hal itu mungkin dan bisa dilaksanakan serta dalam bentuk apa? Nampaknya memang tidak mudah memberikan jawaban terhadap persoalan ini. Tetapi jelas kiranya bahwa masalah yang paling pokok yang harus diselesaikan sebelum bisa diwujudkan kerjasama regional dalam bidang keamanan dan pertahanan adalah masalah persepsi antara negara-negara anggota ASEAN tentang masalah-masalah keamanan dan pertahanan yang dihadapi bersama, terutama persepsi bersama tentang sifat dan sumber ancaman dan bahaya terhadap keamanan dan stabilitas masing-masing negara anggota maupun wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan. Atas dasar persepsi bersama semacam itulah bisa diharapkan dikembangkannya suatu pendekatan bersama terhadap masalah-masalah bersama dalam bidang keamanan dan pertahanan maupun terhadap ancaman bersama yang mungkin dihadapi, walaupun ancaman semacam itu memang ada.

Inilah masalah pokok yang harus dipecahkan lebih dahulu. Mungkin sekali bahwa apa yang digambarkan sebagai masalah keamanan dan pertahanan atau sebagai sesuatu ancaman dan bahaya oleh sesuatu negara anggota berbeda dari apa yang digambarkan oleh negara anggota lain. Mungkin ada yang menganggap ancaman dalam bentuk serangan terbuka dari luar sebagai bahaya utama yang dihadapi terhadap keamanannya; mungkin ada pula yang



menganggap ancaman dalam bentuk infiltrasi dari luar sebagai bahaya utama; atau ancaman dalam bentuk subversi dari dalam negeri; atau ancaman dalam berbagai bentuk, baik dari dalam maupun dari luar. Sifat dan bentuk ancaman yang berbeda akan memerlukan pendekatan yang berbeda dan memerlukan bentuk, pola, atau pengaturan keamanan dan pertahanan yang berbeda pula.

Pada KTT ASEAN di Bali sebenarnya bisa dikatakan telah berhasil dicapai semacam konsensus tentang ancaman dalam pengertian yang masih bersifat umum dan luas, yaitu ancaman yang datang dari subversi seperti dinyatakan dalam Declaration of ASEAN Concord pada bagian yang telah dikutip di muka, yang secara lebih lengkap berbunyi: *Each member state resolves to eliminate threats posed by subversion to its stability, thus strengthening national and ASEAN resilience*. Tetapi dari pengalaman negara-negara Asia Tenggara selama bertahun-tahun bahkan hingga sekarang, subversi mempunyai motif yang berbeda-beda, meskipun mungkin umumnya bermotifkan ideologi, khususnya komunisme, dan mengambil bentuk sebagai gerakan komunis. Tetapi mungkin bisa digolongkan sebagai subversi, gerakan-gerakan lain yang juga melakukan kegiatan-kegiatan subversif untuk mencapai tujuannya seperti gerakan separatisme, yang berkaitan dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, misalnya keagamaan, suku, ras, dan lain sebagainya.

Di samping itu, bahkan tentang ancaman yang datangnya dari luar terhadap keamanan negara-negara anggota ASEAN, sebenarnya semacam konsensus telah tercapai pula sejak berdirinya ASEAN, meskipun juga masih bersifat umum, seperti terlihat dalam salah satu pertimbangan dalam Deklarasi Bangkok yang di muka telah dikutip: *Considering that ..... they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation .....* Sebagai suatu pernyataan umum, sudah cukup, bahwa kita menolak campur tangan luar dari manapun datangnya dan dalam bentuk apapun. Tetapi bagi pembinaan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan, diperlukan gambaran yang lebih jelas bentuk-bentuk campur tangan apa saja yang mungkin dihadapi sebagai ancaman, dan dari mana sumber ancaman itu, meskipun ini semua harus tetap terbuka

untuk ditinjau kembali pada saat-saat tertentu sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia, terutama di Asia dan Asia Tenggara.

## VII

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan perlunya negara-negara anggota ASEAN dewasa ini melakukan pemikiran dan penelitian kembali tentang masalah-masalah keamanan dan pertahanan yang dihadapi kini dan mungkin akan dihadapi pada masa-masa mendatang mengingat perkembangan dunia umumnya, maupun di Asia dan Pasifik pada khususnya, yang sedikit banyak mempunyai pengaruh pada wilayah ini, langsung ataupun tak langsung. Khususnya perlu diperhitungkan adanya realitas baru di semenanjung Indocina beserta segala kemungkinan implikasinya bagi wilayah Asia Tenggara dan berhubungan dengan munculnya rezim-rezim baru di negara-negara Indocina, yang intensif-intensinya terhadap ASEAN maupun terhadap wilayah Asia Tenggara secara keseluruhan masih sulit diduga. Begitu pula implikasi-implikasi penarikan mundur Amerika Serikat terutama dalam arti fisik militer dari wilayah Asia Tenggara, yang tidak saja telah menggoyahkan kredibilitas komitmen dan kekuatan AS, khususnya arti dan perlunya basis-basis militer AS di negara-negara anggota ASEAN tertentu - yang mengandung aspek ekonomis maupun psikologis bagi negara-negara yang bersangkutan; yang telah sekian lama terbiasa menggantungkan diri pada kekuatan AS bagi pemeliharaan keamanannya - tetapi juga telah menimbulkan kesan akan adanya semacam kekosongan di wilayah ini, yang akan mengundang negara-negara besar lainnya untuk mengisi apa yang digambarkannya sebagai kekosongan itu. Ini bisa memperbesar kemungkinan bentrok antara kepentingan-kepentingan negara besar, yang akan mengganggu keamanan dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara.

Sebenarnya masalah pertentangan kepentingan berbagai negara, khususnya negara-negara besar, di Asia Tenggara, bukanlah hal baru. Tetapi perkembangan yang digambarkan di atas, kendati adanya apa yang dikenal sebagai detente antara negara-negara besar, kiranya tidak akan menguntungkan situasi keamanan di Asia Tenggara. Bahkan justru detente antara



Uni Soviet dan Amerika Serikat akan membawa tantangan-tantangan baru bagi Asia dan Asia Tenggara, bukan saja karena detente yang diharapkan akan mengurangi kemungkinan konfrontasi nuklir antara negara-negara besar itu belum tentu akan mengurangi pula kemungkinan pecahnya perang-perang lokal dari artian konvensional, walaupun malahan sebaliknya bisa mendorongnya lebih lanjut, tetapi terutama karena sebagai akibat detente dengan Amerika Serikat, Uni Soviet lebih bisa memusatkan perhatiannya ke Asia dalam menghadapi RRC. Begitu pula halnya dengan RRC dalam menghadapi Uni Soviet, selama kedua negara itu tetap dalam pertikaian dan saling berebut pengaruh dan kepemimpinan,<sup>1</sup> tidak saja di antara negara-negara sosialis, tetapi juga di Asia dan dalam pengelompokan-pengelompokan lainnya.

Ini tidak perlu berarti bahwa perkembangan semacam itu akan menimbulkan ancaman secara langsung terhadap keamanan negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN, ataupun keamanan wilayah ini secara keseluruhan. Tetapi implikasi-implikasi perkembangan demikian perlu diperhitungkan bagi negara-negara anggota ASEAN baik dalam hubungannya dengan negara-negara lain terutama negara-negara besar, maupun dalam kaitannya dengan keadaan dan perkembangan dalam negeri masing-masing. Kondisi-kondisi tertentu mengandung benih-benih konflik dalam masyarakat yang mudah ditunggangi baik oleh unsur-unsur subversi di dalam negeri maupun oleh kekuatan-kekuatan luar untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan negara masing-masing serta wilayah ini secara keseluruhannya, meskipun kondisi-kondisi itu sendiri mungkin belum secara langsung merupakan ancaman. Benih-benih konflik itu bisa bersangkut-paut dengan perbedaan-perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, terutama rasial, suku dan keagamaan, dalam masyarakat. Begitu pula kondisi-kondisi yang mengandung benih-benih ketidakpuasan dan frustrasi sosial sebagai akibat keadaan ekonomi yang buruk yang ditandai oleh banyaknya pengangguran,

---

<sup>1</sup>Daed JOESOEF, "Detente", Analisa Masalah-masalah Internasional, II, No. 8, (Agust. 1973).



inflasi yang tidak terkendalikan, pembagian kesejahteraan yang tidak merata, dan lain sebagainya, atau sebagai akibat kehidupan demokrasi yang tidak sehat seperti tidak berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi secara wajar, dan lain sebagainya.

Demikianlah beberapa faktor yang kiranya perlu dibahas dan diperhitungkan dalam usaha ke arah terkembangkannya suatu persepsi bersama antara negara-negara anggota ASEAN tentang sifat dan sumber-sumber ancaman yang mungkin dihadapi terhadap stabilitas dan keamanannya. Tulisan ini sendiri tidak akan mengajukan atau menganjurkan sesuatu persepsi tertentu tentang ancaman untuk dikembangkan oleh negara-negara anggota ASEAN, melainkan sekedar menitikberatkan perlunya suatu persepsi bersama dikembangkan, dan berusaha menunjuk beberapa problematik untuk dibahas lebih lanjut dan dipecahkan ke arah itu sebelum kita melangkah maju untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan pada tingkat ASEAN. Sebab hanya atas dasar persepsi bersama tentang masalah-masalah keamanan yang dihadapi, khususnya tentang sifat dan sumber-sumber ancaman, kita dapat mengembangkan pendekatan bersama dan bersama-sama menentukan cara-cara dan bentuk-bentuk kerjasama itu.

## VIII

Seperti telah disinggung sebelumnya, masalah-masalah politik, dan lebih-lebih masalah-masalah keamanan dan pertahanan, memang sensitif, terutama kalau dikaitkan dengan kerjasama regional. Belum lagi kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan di antara negara-negara anggota ASEAN dilakukan pada tingkat regional dalam rangka ASEAN, telah timbul salah pengertian, kecurigaan, bahkan tuduhan-tuduhan, seperti yang dilancarkan oleh harian Angkatan Bersenjata Vietnam yang dikemukakan pada permulaan tulisan ini.

Sikap semacam itu mungkin karena kurang mengetahui, kurang mengerti, atau salah informasi. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh prasangka dan sengaja dilontarkan sekedar untuk membenarkan sikap tidak bersahabatnya

terhadap ASEAN, dan mungkin pula sekaligus untuk membantu mengatasi kesulitan di dalam negeri sendiri, khususnya dalam usaha menggalang persatuan antara negara-negara Indocina. Kalau yang menjadi sebab adalah masih adanya pangkalan-pangkalan militer asing di Muangthai dan Pilipina, harus diingat bahwa pangkalan-pangkalan itu kini akan ditinjau kembali dan direncanakan untuk ditarik kembali, yang memperkuat penegasan dalam Deklarasi Bangkok bahwa semua pangkalan asing di wilayah Asia Tenggara bersifat sementara.

Tetapi harus diakui bahwa tuduhan seakan-akan ASEAN menuju ke arah terbentuknya suatu pakta militer dengan dukungan kekuatan suatu negara besar, mudah dimengerti, terutama jika orang berbicara tentang kerjasama regional dalam bidang keamanan dan pertahanan. Sebabnya mungkin adalah bahwa hingga kini pakta militer dengan dukungan kekuatan sesuatu negara besar misalnya SEATO dan NATO dengan dukungan AS, Pakta Warsawa dengan dukungan Uni Soviet, boleh dikatakan merupakan satu-satunya bentuk kerjasama multilateral dalam bidang keamanan dan pertahanan, sehingga kadang-kadang orang kurang memikirkan kemungkinan adanya alternatif lain. Apalagi kini SEATO telah dibubarkan, kedengaran logis jika digambarkan seakan-akan ASEAN akan menggantikan kedudukan SEATO, terutama apabila kerjasama ASEAN diperluas sampai meliputi bidang keamanan dan pertahanan.

Sebenarnya andaikata pembentukan suatu pakta militer memang menjadi keinginan dan rencana bersama negara-negara anggota ASEAN apapun yang menjadi dasar pertimbangannya, itu adalah hak mereka, kalau memang hal itu dianggap paling baik bagi kepentingan nasional mereka masing-masing maupun kepentingan regional ASEAN. Tetapi masalahnya adalah bahwa tidak demikianlah halnya. Jadi bukan saja tuduhan itu tidak benar, tetapi secara prinsipil kita menolak pakta militer, dan bukan karena khawatir akan adanya tuduhan semacam itu. Pakta militer yang mengutamakan pendekatan militer semata-mata terhadap masalah keamanan dan pertahanan bukan saja tidak efektif, tetapi juga karena ketergantungannya pada kekuatan negara besar justru akan mengundang campur tangan luar yang tidak kita kehendaki.



Akan tetapi jika kerjasama regional ASEAN hendak diperluas sampai ke bidang keamanan dan pertahanan, apakah bentuk kerjasama yang merupakan alternatif daripada pakta militer yang harus diperkembangkan, inilah yang masih harus dipikirkan apabila masalah persepsi bersama yang dibahas di atas telah bisa diselesaikan. Mungkin tidak saja bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan yang hingga kini dilakukan atas dasar bilateral antara negara-negara ASEAN dapat ditingkatkan sampai pada tingkat regional dalam rangka ASEAN, tetapi juga lambat laun diperluas untuk meliputi aspek-aspek lain daripada keamanan dan pertahanan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bersama.

## IX

Bagaimanapun bidang keamanan dan pertahanan kiranya akan merupakan suatu masalah penting yang memerlukan pemikiran dan pembahasan lebih lanjut yang masih akan dihadapi ASEAN sesudah KTT. Kalaupun masalah kerjasama dalam bidang-bidang itu selama ini dianggap sensitif, sebagaimana halnya kerjasama dalam bidang politik sebelumnya, jika memang kita sadari adanya masalah-masalah keamanan dan pertahanan di antara negara-negara ASEAN, menghindari memikirkan dan membicarakannya tidak akan membantu pemecahannya. Justru masalah ini perlu dihadapi secara langsung, meskipun penyelesaiannya mungkin tidak akan tercapai segera dan sekaligus, melainkan lambat laun, setapak demi setapak.

Adanya gagasan tentang suatu sistim keamanan bersama Asia yang pertama-tama dilontarkan oleh Brezhnev dari Uni Soviet dalam tahun 1969, apapun yang sebenarnya dimaksudkan dan apapun pertimbangannya, sekurangnya menunjukkan minat dan kesadaran pihak Uni Soviet akan adanya masalah keamanan dan perlunya suatu kerjasama dalam bidang itu di wilayah Asia, dan tentu saja termasuk Asia Tenggara, meskipun kemungkinan persepsi mereka mengenai masalah keamanan di wilayah kita ini tidak sama atau tidak sejalan dengan persepsi kita. Jika kita tidak menghendaki bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut nasib kita di wilayah ini diambil atau terlalu dipengaruhi oleh prakarsa negara-negara lain khususnya



negara-negara besar, dan jika kita benar-benar hendak melaksanakan prinsip self-reliance yang mendasari ketahanan nasional dan regional, maka kita harus memikul tanggung jawab sendiri atas stabilitas dan keamanan di kawasan ini, dan bersama-sama membuat keputusan-keputusan yang menyangkut nasib, keselamatan dan keamanan kita sendiri atas dasar persepsi kita bersama tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau tidak, kita tidak perlu terperanjat jika pada suatu hari negara-negara di kawasan ini semakin tergantung pada kekuatan luar dengan tetap mengundang pangkalan asing di wilayahnya, atau menjadi anggota sesuatu pakta militer, atau mungkin menerima gagasan yang disodorkan dari luar seperti pembentukan sistim keamanan bersama Asia yang diusulkan oleh Uni Soviet, dalam usaha mereka untuk menemukan sesuatu yang mungkin dapat dianggapnya sebagai sandaran atau jaminan bagi pemeliharaan keamanannya.

## X

Satu masalah lain yang masih memerlukan pemikiran lebih lanjut sesudah KTT ASEAN di Bali adalah masalah hubungan antara ASEAN di satu pihak dan negara-negara Indocina di lain pihak. Dari pihak ASEAN sebenarnya telah ada sikap yang jelas dalam arti bahwa ASEAN prinsipnya terbuka untuk negara-negara lain di kawasan ini. Hal itu dapat dilihat dalam Deklarasi Bangkok, Treaty of Amity and Cooperation, bahkan dalam persetujuan mengenai pembentukan sekretariat bersama ASEAN. Tentu saja dengan syarat bahwa negara-negara yang bersangkutan menerima dan menyetujui prinsip dan tujuan perhimpunan itu.

Tambahan pula, setelah pertemuan para Menlu ASEAN ke-8 di Kuala Lumpur tanggal 13-15 Mei 1975 dikeluarkan pernyataan pers yang isinya antara lain:

1. Kesiediaan mereka untuk menjalin hubungan bersahabat dan harmonis dengan bangsa-bangsa Indocina guna membina kerjasama dalam pembangunan nasional atas dasar hidup berdampingan secara damai, saling menguntungkan, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, menghormati kedaulatan wilayah dan integritas nasional serta persamaan derajat dan keadilan di antara sesamanya;

2. Yakin bahwa ASEAN akan mampu mengusahakan rancangan-rancangan yang logis untuk mengembangkan hubungan saling menguntungkan di antara rakyat Asia Tenggara yang masih terbagi dalam perbedaan sistim sosial, karakter, harapan dan aspirasi, guna menciptakan perdamaian, kemajuan dan stabilitas<sup>1</sup>; dan sebagainya.

Dan dalam joint press communique yang dikeluarkan pada akhir KTT di Bali para kepala pemerintahan ASEAN menyatakan antara lain bahwa *They reaffirmed the determination of their respective Governments to continue to work for the promotion of peace, stability and progress in Southeast Asia, thus contributing towards world peace and international harmony. To this end they expressed their readiness to develop fruitful relation and mutually beneficial cooperation with other countries in the region.*

Oleh karena itu baik masalah keanggotaan negara-negara lain di Asia Tenggara dalam ASEAN maupun hubungan antara negara-negara itu di satu pihak dan ASEAN di lain pihak, kini terutama adalah persoalan mereka. Bagi negara-negara ASEAN prinsipnya sudah jelas, tetapi pelaksanaannya tergantung pada minat negara-negara lain yang bersangkutan, dan jika ada perhatian dan kemauan timbal balik, tinggal bagaimana cara-cara yang disepakati bersama dapat ditemukan bagi pelaksanaannya.

Dengan demikian jelas bahwa oleh pihak negara-negara ASEAN tidak pernah dikandung maksud untuk mengambil sikap konfrontatif terhadap negara-negara di Indocina, bahkan jalannya terbuka untuk hubungan baik dan kerjasama, sebab tidak pula ASEAN dimaksudkan untuk mengisolir negara-negara anggotanya dari negara-negara atau kawasan-kawasan lain di dunia. Bagi pertumbuhan ekonominya, negara-negara ASEAN, seperti dinyatakan pada akhir pasal 6 dari Treaty of Amity and Cooperation, *shall continue to explore all avenues for close and beneficial cooperation with other States as well as international and regional organisations outside the region.* Dan hubungan serta kerjasama dengan negara-negara Indocina dapat

---

<sup>1</sup>Antara, 16 Mei 1976/A



dijalankan melalui penggabungan mereka dengan ASEAN pada saatnya yang tepat, atau melalui hubungan bilateral antara masing-masing negara ASEAN, atau melalui kerjasama intraregional, yaitu antara ASEAN di satu pihak dan negara-negara Indocina sebagai kelompok lain di kawasan ini di lain pihak.

Dalam hal ini perlu diingat bahwa perbedaan dalam sistim sosial dan politik tidak harus menjadi halangan bagi hubungan dan kerjasama antara negara-negara, meskipun mungkin tidak selancar seperti hubungan dan kerjasama antara negara-negara yang pada dasarnya menganut sistim sosial dan politik yang serupa. Tetapi perlu ditekankan dalam hubungan ini bahwa meskipun negara-negara anggota ASEAN adalah non-komunis, bahkan dapat dikatakan anti-komunis, hal itu khususnya berlaku intern, yaitu ke dalam negeri masing-masing, dan tidak ditujukan kepada negara-negara komunis itu sendiri. Dengan kata lain sikap non atau anti-komunis negara-negara ASEAN ke dalam tidak menjadi bagian daripada politik luar negerinya. Meskipun demikian hubungan dan kerjasama baru mungkin apabila sikap seperti ini bersifat timbal balik, dan secara konsekwen dilaksanakan prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, serta tidak dilakukan usaha apapun untuk memaksakan sistim sosial politik negara yang satu pada yang lain.

Apapun bentuk hubungan dan kerjasama antara negara-negara ASEAN di satu pihak dan negara-negara Indocina di lain pihak, baik hal itu menyangkut keanggotaan negara-negara Indocina dalam ASEAN atau tidak, semua negara dalam kawasan Asia Tenggara ini mempunyai tanggung jawab atas terciptanya dan terpeliharanya stabilitas dan keamanan di wilayah ini. Dan setiap bentuk konfrontasi antara sesama negara Asia Tenggara akan mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah ini. Oleh karena itu, terlepas dari kepentingan dan pengaruh negara-negara lain khususnya negara-negara besar, demi stabilitas dan keamanan yang sangat dibutuhkan bagi berhasilnya pembangunan nasional masing-masing yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi semua rakyat di kawasan ini, pilihan yang paling sehat sekurang-kurangnya adalah hubungan baik dan kerjasama antara negara-negara di kawasan ini.



## XI

Demikianlah KTT di Bali telah membuka suatu babak baru dalam sejarah kerjasama di wilayah Asia Tenggara, suatu tahap yang menentukan bagi ASEAN dalam menghadapi masa depannya. Ia telah meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh bagi konsolidasi, peningkatan dan perluasan kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang. Bahkan ia telah menggariskan program aksi yang luas untuk dilaksanakan ke arah tercapainya cita-cita ASEAN, dan untuk itu telah pula meletakkan dasar-dasar bagi perbaikan, peningkatan dan pengembangan mekanisme, struktur dan organisasi ASEAN, antara lain dengan disetujuinya pembentukan sekretariat bersama ASEAN yang berkedudukan di Jakarta.

Tentu saja KTT ASEAN belum menangani, apalagi menyelesaikan semua persoalan yang dihadapinya. Seperti kelihatan dari uraian di atas, masih banyak masalah yang harus dihadapi dan dibahas lebih lanjut untuk dicari-cari penyelesaiannya. Bahkan apa yang telah diputuskan masih perlu diperinci lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan. Sebagai dinyatakan dalam joint press communique yang dikeluarkan pada akhir KTT, pertemuan antara Menteri-menteri ekonomi ASEAN akan diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 8-9 Maret 1976 untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil ke arah pelaksanaan keputusan-keputusan KTT tentang masalah-masalah kerjasama ekonomi, yang dalam pernyataan itu diberikan perincian-perincian khusus.

Akan tetapi dalam kondisi dan situasi yang ada, kiranya dapat dikatakan bahwa sebagai titik tolak baru dalam kerjasama ASEAN, KTT ASEAN di Bali, yang telah meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh untuk kerjasama yang lebih erat dan lebih luas di antara negara-negara di Asia Tenggara, khususnya ASEAN, sudahlah memadai dan merupakan sukses besar, dan kiranya merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada waktu ini.

Dari apa yang telah diputuskan di atas kertas, semuanya serba bagus dan menggembirakan, dan ASEAN kelihatan mempunyai masa depan yang cerah. Tetapi penilaian yang sesungguhnya tentulah bukan hanya berdasarkan apa yang ditelorkan di atas kertas, melainkan sejauh mana itu semua dapat dilaksanakan, diwujudkan dan dikembangkan dalam tindak-tanduk lanjut sesudahnya. Cepat atau lambat ini semua bisa dilakukan, dan seberapa jauh,

tentu akan ditentukan pula oleh faktor-faktor obyektif di dalam maupun di luar negara-negara anggota ASEAN: potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya, maupun kondisi, situasi dan perkembangan di luar ASEAN.

Akan tetapi lepas dari faktor-faktor itu semua, faktor-faktor subyektif, terutama faktor manusia sebagai aparat pelaksana untuk mewujudkan gagasan-gagasan ASEAN, untuk melaksanakan apa saja yang telah diputuskan, pada akhirnya akan memegang peranan yang sangat menentukan berhasil tidaknya kerjasama ASEAN. Azas dan gagasan kerjasama ASEAN dengan segala maksud dan tujuan yang telah diikrarkan bersama, harus diyakini benar tidak saja oleh para pemimpin tertinggi tetapi oleh para pemimpin di semua tingkatan dan semua orang yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan dan pengembangan kerjasama ASEAN. Di samping itu, kerjasama ASEAN juga tidak akan berhasil baik tanpa dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat negara-negara ASEAN. Disinilah perlunya usaha pemasyarakatan ASEAN itu dilakukan terus menerus.

Dalam hubungan ini harus dikembangkan pula kebiasaan melihat kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN dalam ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jauh ke depan dalam rangka kepentingan regional. Hal itu mengandung arti bahwa dalam beberapa hal kepentingan nasional jika perlu sedikit dikorbankan untuk sementara waktu demi kepentingan regional, yang dalam jangka yang lebih jauh dan lebih luas berarti untuk kepentingan nasional juga pada akhirnya. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, terutama jika diingat bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN adalah negara-negara yang relatif masih muda, artinya belum lama memperoleh kemerdekaannya, sehingga di negara-negara itu masih terdapat perasaan nasionalisme yang kuat dan kadang-kadang sempit. Begitu pula kesadaran akan kedaulatan nasional yang berlebihan bisa menghambat kerjasama regional, lebih-lebih kalau hal itu disertai dengan kecurigaan atau kekawatiran yang terlalu sensitif terhadap apa saja yang mungkin bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.



Oleh karena itu juga dalam rangka pemasyarakatan ASEAN perlu dibina terus kesadaran, semangat dan solidaritas ASEAN. Untuk itu komunikasi di antara masyarakat-masyarakat ASEAN harus dikembangkan agar selalu dapat dipelihara saling pengertian dan saling percaya, dan saling prasangka dan curiga dapat semakin dikurangi dan diatasi.

Atas dasar itu semua dapat diharapkan bahwa berbagai persoalan dan perbedaan yang kini ada ataupun yang mungkin akan terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN yang mengandung benih-benih pertikaian dan perpecahan, dengan melalui konsultasi dan dialog langsung dan terbuka di antara yang bersangkutan dan dengan penuh iktikad baik serta sikap saling menghargai, dapat diharapkan untuk diatasi secara damai sehingga keutuhan dan kelangsungan hidup ASEAN dapat terjamin untuk selalu maju ke arah cita-citanya.





R A L A T

halaman 12, baris ke-6 dari bawah;

dicetak : ... and taken harus merupakan menyemangati ASEAN.  
seharusnya : ... and take harus merupakan semangat ASEAN.

halaman 41, baris ke-16 dari bawah;

dicetak : ... menggoyahkan kredibitas komitmen ...  
seharusnya : ... menggoyahkan kredibilitas komitmen ...